

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
Alamat : Jl. Surohadikusumo No 1 Pemalang



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR:100.3.3.5/016/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka lancar dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas mengarahkan dan merumuskan kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang berhubungan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 dari masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang; dan
 - b. membahas dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang dan Ketua Tim Teknis bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kode rekening 4.08.4.08.01.06.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



HERIYANTO, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196802141991031014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.5/ 16 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGARAH DAN TIM TEKNIS LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Penanggung jawab	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua Tim Pengarah	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris Tim Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Pengarah	
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua Tim Teknis	
6.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris Tim Teknis	Riza Khoerul Anam, S.E.Ak., M. Akun.
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
8.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
11.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
12.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
14.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
15.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	Lulut Yuni Pertiwi, S.E., M.A.P., MIDS.
17.	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	Dian Setiyowati
18.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	Wachyono, S.E.
19.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	Afroh Khasanati, S.E.

NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
20.	Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	Gendut Suroso

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



HERIYANTO, S.Pd. M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196802141991031014

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja. Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Komitmen, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Pematang pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pematang, 26 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
SETDA
HERIYANTO, S.Pd, M.Si
NIP. 19680214 199103 1 014



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

Capaian sasaran strategis1 " Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan Dan Kesra":

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Di Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana" dengan rumus hitung yaitu "Rata-rata capaian kinerja dari Bagian yang ada di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat".
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja satu Program, yakni Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 sebesar 96,10 %, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 105,99 %. Dengan demikian kinerja Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang tercapai dengan capaian sebesar 110,29 %.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 95,59 % terjadi peningkatan sebesar 9,07 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang kedepan, sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi antar perangkat daerah yang memiliki pelimpahan kewenangan kepada Camat, untuk mendukung layanan yang efektif dan efisien.

2. Peningkatan kapasitas SDM dalam inventarisasi kebutuhan Kejasama Daerah.
3. Peningkatan SDM penyusun produk hukum pada perangkat daerah serta optimalisasi peran Sekretariat Daerah dalam proses perencanaan, implementasi maupun evaluasi atas kebijakan yang ada.
4. Optimalisasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pematang Jaya melalui peningkatan kompetensi dan kesadaran atas peran masing-masing pihak berkaitan dengan apa harus dikerjakan dalam pengentasan kemiskinan di daerah, sehingga diharapkan akan terwujud langkah dinamis yang terarah dalam penanganan kemiskinan.

Capaian Sasaran Strategis 2 " Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Perekonomian dan Pembangunan":

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana" dengan rumus hitung yaitu "Rata-rata capaian kinerja dari Bagian yang ada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan".
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja satu Program Program, yakni Program Perekonomian dan Pembangunan.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 sebesar 81,27 %, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 77,31 %. Dengan demikian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya tercapai dengan capaian sebesar 95,13%.

- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 77,22% terjadi peningkatan sebesar 0,09 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya kedepan, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kinerja BUMD dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah dan perekonomian daerah.
2. Optimalisasi perumusan kebijakan pengendalian inflasi daerah.
3. Koordinasi dengan terkait untuk meminimalisir eksese negatif atas pemanfaatan Sumber Daya Alam, serta mengupayakan menciptakan *multiplier effect* yang optimal dalam pembangunan daerah.
4. Optimalisasi rangkaian proses Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
5. Intensifikasi pelaksanaan monev pembangunan daerah untuk memastikan proses berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian Sasaran Strategis 3 ” Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Administrasi Umum ”:

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Umum yang terlaksana” dengan rumus hitung yaitu “Rata-rata capaian kinerja dari Bagian yang ada di bawah Asisten Administrasi Umum”.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja satu Program Program, yakni Program Administrasi Umum.

- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 sebesar 60,40 %, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 60,29. Dengan demikian kinerja Program Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 99,81 %.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 60,31 % terjadi penurunan sebesar 0,02 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran implementasi Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah sebagai wujud dukungan dalam perbaikan maupun peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
2. Perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan pada Sekretariat Daerah.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedural fasilitasi layanan keprotokolan untuk mendukung efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas KDH/WKDH.

Capaian sasaran 4 “ Meningkatkan kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan “

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu
 - “Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh “ dengan rumus hitung yaitu Hasil Survey Kepuasan Masyarakat.
 - ”Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja” dengan rumus hitung yaitu Nilai SAKIP dari Inspektorat.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (Satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh tahun 2024 sebesar 83,89, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 83,64. Dengan demikian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya tercapai dengan capaian sebesar 99,70 %.
- Target capaian Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 67, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 67,22. Dengan demikian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya tercapai dengan capaian sebesar 100,32%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya kedepan, sebagai berikut:

1. Perbedaan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan pemerintah menyebabkan tingkat kepuasan yang bervariasi, menuntut evaluasi dan perbaikan layanan secara berkesinambungan.
2. Kompetensi dan jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan program serta penyelenggaraan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan agar dapat memenuhi standar layanan.
3. Perlunya membuat pedoman teknis perencanaan kinerja untuk mendukung pelaksanaan kinerja organisasi yaitu pedoman atas penyusunan sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.
4. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang melibatkan kepala bagian secara berkala dan dilengkapi dengan administrasi pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.3. Dasar Hukum.....	4
1.4. Sistematika Laporan Kinerja.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2021-2026 Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 Capaian Kinerja.....	15
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	16
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	16
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir 19	
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	64
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	67
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	70
3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	3
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	8
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	9
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024	11
Tabel 2. 5 Program Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024	12
Tabel 2. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024	13
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	16
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	16
Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja	20
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan	21
Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Bagian Hukum	26
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat.....	31
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	39
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan	47
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.....	52
Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Bagian Organisasi	56
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	58
Tabel 3. 12 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	64
Tabel 3. 13 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	67
Tabel 3. 14 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi.....	70
Tabel 3. 15 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	3
---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2. Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang:

1.1.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang, Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang mempunyai tugas :

Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

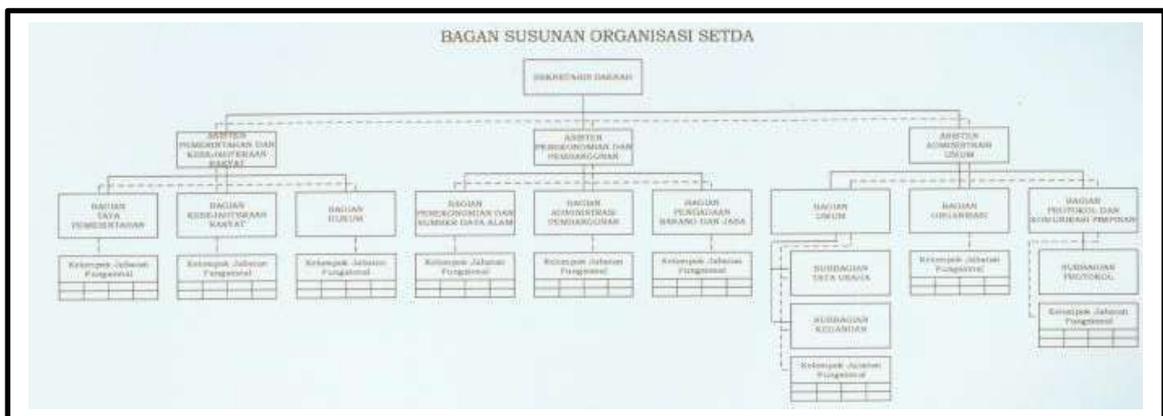
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang mempunyai fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah;

- o Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang



Sumber : Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2023

1.1.2. Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Berikut adalah anggaran yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang :

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp 59.413.930.250,-
APBD	Tahun 2024	Rp 51.884.523.271,-
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp -

Sumber : APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2024

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Peraturan lainnya berkaitan Tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Nama Daerah.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan

permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Matriks Renstra Sekretariat Daerah 2021-2026
- 3 Matriks Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024
- 4 Pohon Kinerja Tahun 2024
- 5 Cascading Tahun 2024
- 6 Hasil Review Bagian Organisasi
- 7 Tindak Lanjut LHE Inspektorat 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2021-2026 Perangkat Daerah

Tujuan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip Good governance Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip Good governance			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibawah bidang pemerintahan dan kesra, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum	Na	71,9	73,0	73,7	74,9	75,4
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan	Na	91,93	92,27	93,13	93,87	94,40

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	Kesra yang terlaksana						
		1.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	Na	65,81	68,40	69,13	71,52	72,13
		1.3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	Na	57,87	58,37	58,77	59,18	59,59

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	1.1	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang Terlaksana	%	Rata-rata capaian kinerja dari Bagian yang ada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	$(\text{capkin Bag. Tapem} + \text{Capkin Bag. Kesra} + \text{Capkin Bag hukum}) / 3$	Dokumen IKU
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	2.1	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	%	Rata-rata capaian kinerja dari Bagian yang ada di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	$(\text{capkin Bag. Perek} + \text{Capkin Bag. Adpem} + \text{Capkin Bag PBJm}) / 3$	Dokumen IKU
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Umum	3.1	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang Terlaksana	%	Rata-rata capaian kinerja dari Bagian yang ada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum	$(\text{capkin Bag. umum} + \text{Capkin Bag. org} + \text{Capkin Bag prokom}) / 3$	Dokumen IKU
4	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan	4.1	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	Indeks	Rata-rata hasil survey kepuasan layanan pada	Rata-rata hasil survey kepuasan layanan pada masing-masing Bagian	Dokumen IKU

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
	urusan Pemerintahan				masing-masing Bagian		
		4.2	Nilai SAKIP	Nilai	Nilai SAKIP Setda	Nilai SAKIP Setda	Dokumen IKU

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 :

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibawah bidang pemerintahan dan kesra,	%	78,91

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Good governance			perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum		
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang Terlaksana	%	96,10
		1.2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	%	81,27
		1.3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	%	60,40

Sumber : Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang Terlaksana	96,10
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	81,77
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	60,40

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	83,89
		Nilai SAKIP	67,25

Sumber :Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33,664,893,899
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15,944,376,006
3. Program Perekonomian dan Pembangunan	2,275,253,366

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang :

Tabel 2. 5 Program Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No.	Sasaran Startegis Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	TERLAMPIR		

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33,023.812.899
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.722.625.006
3. Program Perekonomian dan Pembangunan	1.932.935.645

Pada tanggal 23 bulan September tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan adanya Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang Terlaksana	96,10
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	81,77
	Meningkatnya kualitas	Persentase koordinasi	60,40

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat yangdiperoleh	83,89
		Nilai SAKIP	67,25

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Setda Kabupaten Pematang Tahun 2024

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33,664,893,899
2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	15,944,376,006
3. Program Perekonomian dan Pembangunan	2,275,253,366

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Selabu selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Selabu yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Selabu.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana	96,10	105,99	110,29	ST	Bag. Tata Pemerintahan, Bag. Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Persentase koordinasi penyelenggaraan	81,77	77,31	95,13	ST	Bag. Perekonomian dan SDA, Bag. Administrasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana					Pembangunan, Bag. PBJ
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	60,40	60,29	99,81	ST	Bag. Umum, Bag. Organisasi, Bag. Prokompim
4	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	83,89	83,64	99,70	ST	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Nilai SAKIP	67,25	67,22*	99,96	ST	LHE Inspektorat

Sumber : Bagian pada Sekretariat Daerah Kab. Pemalang

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja untuk “*Tujuan/Sasaran*” yang diukur dengan indikator **Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana** mencapai **105,99 %**, dengan persentase capaian sebesar **110,29 %**. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam **kategori “Baik”**.

Kinerja indikator ini merupakan pencapaian dari indikator sebagaimana berikut:

1. Peresentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan

Pencapaian Sasaran Pertama didukung melalui indikator Peresentase terlaksananya administrasi tata pemerintahan. Pada Tahun 2024 terdapat hal-hal positif yang mendukung pencapaian kinerja yang bersumber dari Pelaksanaan Tertib administrasi kecamatan/kelurahan selama ini didukung oleh faktor pelaporan pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara tepat waktu, adanya bimbingan teknis petugas pengumpul data LPPD, koordinasi dilakukan lebih intens untuk ketepatan pemenuhan data capaian dan data dukung IKK LPPD, adanya desk verifikasi IKK LPPD untuk memastikan kesesuaian dan kualitas data capaian dengan data dukung serta pelaksanaan rakor kerjasama secara periodik. Selain itu juga ditopang dari adanya tertib administrasi pada Kecamatan dan Kelurahan dan perbaikan kualitas LPPD Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, serta layanan fasilitasi kerjasama/sinergi daerah.

2. Pesentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat.

Pencapaian indikator mendapat supporting yang bersumber dari kekuatan SDM yang dimiliki yaitu kapasitas tenaga perancang peraturan perundangan sehingga dapat mempercepat pengangan penyusunan rancangan produk hukum dan dokumentasi peraturan produk hukum yang mudah diakses dan tersedia secara lengkap sehingga memudahkan dalam proses penyusunan produk hukum daerah didukung dari perbaikan pada kinerja penyelesaian produk hukum daerah dimana terjadi peningkatan jumlah penyelesaian rancangan produk hukum menjadi produk hukum daerah pada tahun 2024, dimana hal tersebut didukung melalui pelaksanaan koordinasi yang baik kepada *stakeholder* terkait sehingga dapat mempermudah penyelesaian rancangan produk hukum yang diajukan peningkatan kepuasan layanan bantuan hukum.

3. Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat

Indikator ini turut mendukung pencapaian sasaran Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Terlaksana. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi terkait, telah mempertahankan kinerja berupa Lembaga keagamaan yang aktif dan perbaikan kualitas layanan keagamaan.

Sarasan selanjutnya adalah **Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana** mencapai **76,98**, dengan persentase capaian sebesar **111,25**. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam **kategori “Baik”**.

Sarasan selanjutnya adalah **Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang Terlaksana** mencapai **60,29**, dengan persentase capaian sebesar **102,58 %**. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam **kategori “Baik”**.

Sarasan selanjutnya adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat yang Diperoleh** mencapai **83,64**, dengan persentase capaian sebesar **99,70 %**. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam **kategori “Baik”**.

Sarasan terakhir adalah **Nilai SAKIP** mencapai **67.25**, dengan persentase capaian sebesar **99,96 %**. Dengan pencapaian tersebut, kinerja ini diklasifikasikan dalam **kategori “Baik”**.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 dan 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang Terlaksana	94,69	95	95,57	105,99	110,90
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	68,94	77,22	81,21	77,31	95,19
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	59,85	60,31	60,40	60,29	99,81
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	NA	83,77	83,89	83,64	99,70
		Nilai SAKIP	66,5	67,22	67,25	67,22	100,32

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja "Tujuan/Sasaran" yang diukur dengan indikator

Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana mengalami **peningkatan** dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar **95**, yang menunjukkan **adanya peningkatan kinerja apabila dibandingkan tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 94,69**. Peningkatan ini disebabkan adanya perbaikan kinerja pada penyelesaian produk hukum daerah, peningkatan kepuasan layanan bantuan hukum, peningkatan kepuasan layanan informasi hukum, serta peningkatan capaian persentase produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Memasuki tahun 2024, realisasi kinerja meningkat menjadi **112,37**. Hal ini peningkatan ini didukung dengan adanya layanan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar daerah/lembaga yang melebihi target kinerja, meskipun dalam pelaksanaannya belum melandaskan kepada perencanaan kebutuhan kerjasama. Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari upaya penerapan strategi perbaikan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Adapun pencapaian kinerja sebagai penopang pencapaian kinerja pada tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan

Merupakan kinerja dari Bagian Tata Pemerintahan yang didalamnya terbangun dari pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	PERESENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI		100	123,33	123,33

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	TATA PEMERINTAHAN				
1.	Persentase Kecamatan dan Kelurahan Tertib Administrasi	(Jumlah kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi/Jumlah kecamatan dan kelurahan) X 100%	100	100	100
2.	Persentase Kesesuaian Dokumen LPPD	Checklist kesesuaian materi dokumen LPPD	100	100	100
3.	Persentase Kerjasama dan Sinergi yang Ditindaklanjuti	(Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti/ Jumlah potensi kerjasama) X 100%	100	170	170

Pelaksanaan tertib administrasi pada kecamatan dan kelurahan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan publik termasuk didalamnya memudahkan publik dalam mendapatkan pelayanan. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Selanjutnya diatur pula terkait pelimpahan kewenangan kepada Kecamatan untuk mempermudah layanan publik kepada masyarakat melalui Peraturan Bupati Pematang Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 tahun 2017 tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. Bagian Tata Pemerintahan secara berkesinambungan melakukan koordinasi, untuk dapat memastikan terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan sampai ke tingkat pelayanan kecamatan, dengan harapan akan meningkatkan kualitas layanan publik yang merata pada semua kecamatan di Kabupaten Pematang.

Tertib administrasi kecamatan/kelurahan selama ini didukung oleh faktor pelaporan pelaksanaan pelimpahan kewenangan secara tepat waktu. Namun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelimpahan kewenangan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Belum optimalnya peran perangkat daerah yang memiliki pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dalam hal pendampingan pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut.
- Pelimpahan kewenangan tidak disertai pelimpahan anggaran, sehingga implementasi terkesan sulit dilaksanakan.
- Kompetensi dan kesiapan SDM di kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan.

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah terkait sasaran pertama, maka hal yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan untuk meningkatkan tertib administrasi kecamatan/kelurahan adalah Peningkatan koordinasi untuk menjamin adanya sinergitas pelaksanaan pelimpahan kewenangan melalui optimalisasi Pembina Teknis Pemerintahan Desa, dimana diharapkan akan lebih mempermudah penyampaian informasi kepada masyarakat luas.

Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintah daerah dapat dilihat dari penyajian laporan LPPD yang disusun secara komprehensif dan didukung dengan keandalan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada Tahun 2023, pencapaian nilai atas evaluasi LPPD yang dicapai Pemerintah Kabupaten Pematang sebesar 3,1827 Pencapaian ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- Adanya bimbingan teknis petugas pengumpul data LPPD

- Koordinasi dilakukan lebih intens untuk ketepatan pemenuhan data capaian dan data dukung IKK LPPD
- Adanya desk verifikasi IKK LPPD untuk memastikan kesesuaian dan kualitas data capaian dengan data dukung

Kinerja tersebut masih dirasa belum optimal yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Masih terdapat pemahaman yang kurang dari pengelola data pada masing-masing perangkat daerah terkait definisi operasional IKK.
- Dalam pemenuhan data capaian dan data dukung IKK perangkat daerah masih ada yang tidak tepat waktu.
- Ketersediaan data dukung yang belum lengkap.

Untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang langkah yang dapat ditempuh antara lain:

- Adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah
- Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat agar mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan LPPD

Berkaitan dengan pemenuhan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pelaksanaan kerja sama daerah ditujukan untuk :

- Memantapkan hubungan dan keterikatan daerah satu dengan daerah yang lain dalam kerangka NKRI;
- Menyeraskan pembangunan daerah;
- Menynergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, serta daerah dengan luar negeri;
- Meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah.

Mengingat betapa besarnya manfaat pelaksanaan kerja sama, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya, mendorong kepada seluruh Perangkat Daerah untuk bisa menggali potensi kerja sama. Koordinasi yang baik diperlukan untuk mensukseskan pelaksanaan kerja sama daerah, dimana diharapkan bisa mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pematang Jaya. Faktor yang mendukung pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah antara lain pelaksanaan rakor kerjasama secara periodik. Realisasi kerjasama pada tahun 2024 sebesar 170% dari target 100%, dimana ditargetkan ada 10 jenis kerjasama yang difasilitasi, namun pada pelaksanaannya mencapai 17 kerjasama. Hal tersebut cukup berperan signifikan dalam mendorong perangkat daerah untuk melakukan kerjasama daerah. Namun demikian, masih terdapat hal-hal yang menyebabkan pelaksanaan fasilitasi kerjasam belum optimal antara lain:

- Masih terdapat Perangkat Daerah yang meminta fasilitasi kerja sama daerah secara mendadak dalam tahun anggaran berjalan. Hal tersebut memberikan kesan tidak ada perencanaan kebutuhan kerjasama dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Tercapainya tidaknya target kegiatan sangat tergantung pada Perangkat Daerah dalam menjalin kerja sama guna mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditangani serta tergantung pula keseriusan calon mitra/mitra kerja sama dalam memproses dokumen kerja sama (kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama).

Kedepan, akan terus diupayakan untuk mendorong Perangkat Daerah agar melakukan pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan. Hal tersebut sangat penting dan strategis dalam

upaya membantu menentukan kebijakan pada Pemerintah Kabupaten Pematang.

2. Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat

Merupakan kinerja dari Bagian Hukum, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Capaian Kinerja Bagian Hukum

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	PERSENTASE TERLAKSANANYA FAILITASI DAN KOORDINASI HUKUM BAGI PEMERINTAH DAERAH SERTA MASYARAKAT		93	88,71	95,38
1.	Persentase rancangan produk hukum menjadi produk hukum	Jumlah produk hukum daerah/jumlah rancangan produk hukum daerah) X 100%	96	97,91	101,99
2.	Persentase perkara hukum yang diselesaikan	Jumlah perkara selesai/Jumlah Perkara yang diadakan X 100	100	100	100
3.	Indeks kepuasan pelayanan bantuan hukum	Survey kepuasan layanan bantuan hokum	84	82,65	98,39
4.	Tingkat kepuasan pelayanan informasi hukum	Survey kepuasan layanan informasi hokum	85	82,65	97,24
5.	Persentase jumlah produk hukum yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	(Jumlah produk hukum sesuai perundang-undangan/jumlah seluruh produk hukum daerah) X 100%	100	80,32	80,32

Perancangan dan penyusunan produk hukum daerah merupakan hal yang sangat penting dan mendasar. Hal tersebut disebabkan semua kegiatan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya wajib memiliki payung hukum yang jelas. Pembaharuan produk hukum, merupakan hal yang mutlak dilakukan untuk menunjang efisiensi dan efektifitas serta peningkatan kualitas layanan masyarakat. Proses dan mekanisme Penyusunan produk hukum daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pada beberapa jenis produk hukum daerah, penyusunannya mewajibkan kolaborasi maupun evaluasi dari pihak lain seperti Legislatif, Pemerintah Provinsi, maupun instansi lain selaku pembina urusan pemerintahan daerah. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antar berbagai pihak sehingga bisa menghasilkan peraturan hukum yang benar, efektif dan efisien, yang bisa berguna dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.

Berkaitan dengan penyelesaian penyusunan produk hukum daerah, terdapat beberapa hal yang menyebabkan proses penyelesaian produk hukum tidak tepat waktu antara lain:

- Perlunya peningkatan pemahaman dalam penyusunan produk hukum oleh OPD pemarkarsa.
- Rancangan produk hukum dikirimkan pada akhir tahun sehingga lewat tahun anggaran.

Adapun faktor yang mendukung pencapaian penyelesaian produk hukum daerah antara lain:

- Dukungan kapasitas tenaga perancang peraturan perundangan sehingga dapat mempercepat pengangan penyusunan rancangan produk hukum.
- dukungan dokumentasi peraturan produk hukum yang mudah diakses dan tersedia secara lengkap sehingga memudahkan dalam proses penyusunan produk hukum daerah.

Guna meningkatkan kinerja penyelesaian produk hukum daerah, langkah yang akan diambil pada masa mendatang adalah:

- a. Mengusulkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas legal drafting bagi personil penyusunan produk hukum pada Perangkat Daerah.
- b. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penyusunan produk hukum dengan instansi/lembaga terkait.
- c. Pemantauan, evaluasi dan monitoring penyusunan produk hukum sesuai dengan jadwal yang ditetapkan/diusulkan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya adalah Persentase Perkara Hukum yang Diselesaikan. Indikator ini mengacu kepada bantuan hukum yang diberikan kepada Pemerintah Daerah maupun masyarakat miskin. Harapannya, semua perkara yang ditangani melalui pemberian bantuan bantuan hukum dapat terselesaikan dengan baik, dan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak. Selain itu, Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Kendala utama dalam proses pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah sampai saat ini belum pernah memberikan bantuan hukum, hal tersebut disebabkan secara ketentuan harus dilakukan melalui pihak ketiga yaitu Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum yang telah mendapatkan sertifikasi dari Kemenkum HAM. Namun demikian, di Wilayah Kabupaten Pematang Jaya belum ada Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi.

Namun demikian, sebagai penerima amanah tidak hanya berpangku tangan menghadapi hal tersebut, berbagai upaya telah dilaksanakan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara lain dengan:

- Komunikasi dan Koordinasi yang intens dengan Pengguna dalam rangka penanganan perkara hukum
- Penanganan dilakukan sebelum adanya permasalahan, sehingga penanganannya di sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Akses informasi terkait pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu hak dari masyarakat. Hal tersebut dikandung maksud sebagai upaya control atau pengawasan, maupun upaya peningkatan kualitas layanan dari masyarakat. Demikian pula halnya dengan informasi hukum, masyarakat berhak mengetahui berbagai peraturan hukum yang ada sebagai landasan dalam melaksanakan kewajiban dan menuntut hak kepada pemerintah. Pemberian layanan informasi hukum merupakan salah satu implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun bentuk layanan yang diberikan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Pematang Jaya terkait pemberian informasi hukum antara lain pengelolaan web JDIH, yang didalamnya memuat semua produk hukum daerah, dan bisa diakses secara bebas oleh masyarakat umum, dan Klinik

Hukum yang berupaya mendekatkan layanan kepada masyarakat, maupun pemerintah desa, dengan sistem layanan jemput bola kepada stakeholder. Terkait dengan layanan informasi dokumentasi produk hukum, telah dilakukan pengukuran kepuasan layanan kepada penggunanya. Berdasarkan survey, masih terdapat aspek yang belum optimal yaitu terkait kemudahan pelayanan pengaduan, kemudahan prosedur, dan kualitas produk. Untuk itu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan pada masa mendatang antara lain melalui:

- a. Sosialisasi keberadaan JDIH, prosedur pencarian produk hukum melalui JDIH, dan layanan aduan secara lebih masif melalui media publikasi yang ada.
- b. Pengaktifan kembali aplikasi JDIH versi android.
- c. Sosialisasi Perbup Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan JDIH dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dalam Web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pematang Jaya.

Relevansi produk hukum daerah dengan peraturan perundangan lainnya harus selalu diperhatikan oleh semua elemen dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya. Hal tersebut untuk menjaga legalitas semua kebijakan yang ditempuh dalam upaya menjalankan roda pemerintahan. Persentase Jumlah Produk Hukum yang Sesuai dengan Ketentuan Perundangan Yang Berlaku menjadi salah satu tolok ukur dalam menjalankan fungsi pengawasan produk hukum daerah. Pencapaian indikator ini dihitung berdasarkan rewiu keberlakuan perda tahun 2015 sampai dengan 2023, sebanyak 116 perda. Dari hasil rewiu diperoleh data perda berlaku = 98 perda (84,48%) dan perda tidak berlaku = 18 perda (15,52%).

Untuk lebih meningkatkan kinerja terkait Persentase Jumlah Produk Hukum yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundangan yang Berlaku, maka langkah strategis yang akan diupayakan antara lain melalui:

- a. Peningkatan kapasitas analisis hukum dalam analisis dan evaluasi hukum.
- b. Kolaborasi kajian perda dan perpup dengan analisis kebijakan dan instansi terkait.

3. Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat

Merupakan kinerja dari Bagian Kesra, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Bagian Kesejahteraan Rakyat

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		95,3	94,26	98,91
1.	Persentase Lembaga Keagamaan Yang Aktif	(Jumlah tempat ibadah, sarana keagamaan, lembaga keagamaan, sarana pendidikan keagamaan yang aktif/Jumlah seluruh lembaga) X 100% lembaga keagamaan	100	100	100
2.	Tingkat kepuasan layanan kegiatan keagamaan	Survey kepuasan layanan keagamaan.	91,5	85,66	93,62
3.	Persentase lembaga sosial yang aktif	(Jumlah lembaga sosial yang aktif/Jumlah	100	100	100

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
		lembaga sosial yang terdata) X 100%			
4.	Tingkat kepuasan layanan pembinaan ODMK	Survey kepuasan layanan pembinaan ODMK	85	85,66	100,78
5.	Persentase kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi	(Jumlah kegiatan penanggulangan terintegrasi/jumlah kebutuhan kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan) X 100%	100	100	100

Indikator penopang yang pertama adalah Persentase Lembaga Keagamaan Yang Aktif. Hal tersebut mewakili fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk melakukan monev dan verifikasi atas Lembaga Keagamaan yang ada di kabupaten Pemalang. Dalam pelaksanaan tugas ini Bagian Kesra telah berkolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pemalang. Kriteria keaktifan Lembaga keagamaan telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Pada Tahun 2024 terdapat 11 lembaga keagamaan aktif yang ada di Kabupaten Pemalang. Data tersebut bersumber dari Kementerian Agama Kabupaten Pemalang.

Peran Sekretariat Daerah adalah membantu dalam kesuksesan kebijakan terkait pengembangan dan pembinaan keagamaan di Kabupaten Pemalang, terutama dalam hal pemberian bantuan sosial di bidang Keagamaan. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut, dapat meningkatkan peran Lembaga keagamaan dalam mendukung stabilitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Target kinerja indikator ini adalah 100 %, Adapun realisasinya adalah 100% atau 100 % dari target, realisasi ini sama dengan tahun 2024. Hal yang mendukung pencapaian indikator ini adalah :

- Adanya koordinasi yang baik antar berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga memudahkan pencapaian tujuan yang diinginkan.
- Adanya dukungan pimpinan untuk bisa mensukseskan pelaksanaan semua kegiatan dalam menunjang fasilitasi peningkatan mental spiritual masyarakat.

Adapun langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja indikator ini pada masa mendatang adalah.

- Meningkatkan komunikasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas layanan.
- Meningkatkan kompetensi SDM pelaksana layanan.

Indikator penopang selanjutnya adalah Tingkat kepuasan layanan kegiatan keagamaan. Hal tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas layanan fasilitasi layanan pelaksanaan kegiatan keagamaan di Kabupaten Pemalang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Kesra telah melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan sebagai salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Diharapkan dengan adanya fasilitasi ini, masyarakat akan merasa terayomi dan terjamin kebebasannya dalam memeluk dan menjalankan kegiatan beragama. Diharapkan dukungan tersebut akan meningkatkan rasa keimanan pada masyarakat yang dampaknya akan membawa kepada ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Target kinerja indikator ini adalah sebesar 91,5, Adapun realisasinya sebesar 85,66 atau 93,62 % dari target.

Pada tahun 2024 nilai kepuasan masyarakat/pelanggan pengguna layanan ini adalah 82,3, dengan demikian terdapat peningkatan kepuasan pelanggan bila dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Selanjutnya indikator yang lain adalah Persentase lembaga sosial yang aktif. Indikator ini digunakan untuk mendukung kesuksesan kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial kemasyarakatan. Peran lembaga sosial dalam pembangunan daerah sangat diperlukan oleh pemerintah, hal tersebut dikarenakan Lembaga sosial dapat secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, membantu melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, pemerintah sudah selayaknya turut berperan dalam menumbuhkan dan membina aktivitas Lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di daerahnya. Terkait dengan peran tersebut, salah satu Langkah yang diambil adalah adanya pemberian bantuan sosial kepada Lembaga sosial yang bertujuan untuk memberikan stimulan sehingga mereka bisa aktif dan berkontribusi nyata dalam proses pembangunan daerah. Target kinerja indikator ini adalah 100 %, dan realisasi kinerja adalah 100%, hal tersebut sama dengan realisasi tahun 2023. Hal tersebut menandakan berdasarkan data yang tersedia, semua Lembaga sosial tersebut dinyatakan aktif.

Indikator selanjutnya adalah Tingkat kepuasan layanan pembinaan ODMK. Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) menjadi sebuah permasalahan yang harus ditangani Bersama oleh semua pihak. Pemerintah diharapkan hadir membantu

dalam penanganan masalah ODMK, dikarenakan mereka juga merupakan warga masyarakat yang harus diayomi, dilindungi, dan diperhatikan kesejahteraannya. Keberadaan ODMK pada suatu lingkungan masyarakat, tidak sepenuhnya bisa dipahami dan diterima. Masih banyak warga yang menganggap hal tersebut sebagai sebuah keburukan sehingga akan mengucilkan dan bahkan membuang penderita. Demikian pula sikap masyarakat, tidak seluruhnya bisa bersikap baik pula terhadap keluarga penderitanya. Atas dasar hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pembinaan untuk menghapus stigma negatif atas keberadaan ODMK, termasuk mengupayakan adanya jaminan kesejahteraan bagi penderita, mengingat bagaimanapun mereka adalah manusia yang memiliki hak untuk bisa dipenuhi.

Pembinaan secara langsung terhadap ODMK dilakukan oleh Puskesmas, yang diharapkan dapat membantu mengatasi gejala gangguan yang ada. Peran bagian Kesra adalah melakukan pemantuan dan evaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pembinaan ODMK, untuk menentukan Langkah perbaikan ke depan, sehingga kegiatan pembinaan bisa tepat sasaran dan membantu dalam penanganan masalah ODMK. Target kinerja pada tahun 2024 sebesar 85, dengan realisasi sebesar 85,66 atau 93,62 % dari target. Pada tahun 2023, realisasi IKM yang diperoleh atas layanan ini sebesar 81,49. Langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja indikator ini pada masa mendatang adalah:

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, sehingga diharapkan bisa memudahkan dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pematang Siantar.

- Meningkatkan kompetensi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan.

Indikator pendukung yang terakhir adalah Persentase kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi. Realisasi indikator pada tahun 2024 adalah 100 %, dan hal tersebut sama apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Masalah pengentasan kemiskinan merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Dengan persentase penduduk miskin mencapai 14,92 % atau 195,84 ribu jiwa menjadi tanggung jawab bersama semua perangkat daerah untuk menekan angka tersebut. Pekerjaan ini mutlak memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak, dan tidak bisa dikerjakan oleh satu pihak maupun satu sektor saja.

Peran Sekretariat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, adalah sebagai sekretaris TKPKD. Mendasari peraturan tersebut, peran Sekretariat Daerah menjadi sangat strategis dalam membantu Pimpinan Daerah untuk mengkoordinir kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pematang Jaya. Koordinasi yang baik mutlak diperlukan sehingga pelaksanaan kegiatan perangkat daerah bisa difokuskan untuk pencapaian tujuan tersebut.

Kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pematang Jaya memiliki tiga tujuan yaitu 1.) Mewujudkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, 2.) memperkuat kepastian kelompok

masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan dan 3.) meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan. Hal tersebut telah tercantum dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pematang tahun 2021-2026, dimana dalam implementasinya memerlukan koordinasi dan keterlibatan semua pihak. Atas dukungan implementasi pengentasan kemiskinan terintegrasi, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Pematang telah mencapai target RPKD, dimana pada akhir tahun 2024 persentase kemiskinan sebesar 14,92 atau mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 15,03. Untuk perbaikan kinerja ke depan, pelaksanaan koordinasi lintas sektoral yang baik tetap dan mutlak diperlukan, mengingat hal ini adalah menjadi pekerjaan Bersama dan harus dilaksanakan secara oleh semua pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya realisasi kinerja "Tujuan/Sasaran" yang diukur dengan indikator **Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana** mengalami **peningkatan** dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar **77,22**, yang menunjukkan **adanya peningkatan kinerja apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, dimana pada tahun tersebut terjadi realisasi sebesar 68,94**. Peningkatan kinerja ini disebabkan adanya perbaikan kinerja pada pencapaian level maturitas PBJ, pencapaian kinerja SAKIP Perangkat Daerah, perbaikan kualitas pencapaian realisasi anggaran dan pencapaian output kegiatan pada perangkat daerah di Kabupaten Pematang. Di sisi lain, kinerja sasaran ini sangat ditentukan oleh faktor eksternal antara lain kebijakan OJK atas hasil pelaksanaan money Lembaga

Keuangan Mikro di sebuah Kabupaten, mekanisme penentuan harga barang yang sangat ditentukan oleh para pelaku pasar sehingga berdampak pada belum optimalnya kebijakan pengendalian harga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Memasuki tahun 2024, realisasi kinerja mengalami peningkatan menjadi **77,31**. Peningkatan ini terjadi akibat adanya perbaikan kinerja kontribusi laba BUMD kepada PAD, kepatuhan perusahaan dalam pemanfaatan SDA, pengendalian pembangunan yang baik, serta pelaksanaan PBJ yang lebih baik. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan optimalisasi kinerjanya yaitu dalam hal intensifikasi rekomendasi TPID dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dikarenakan terdapat faktor yang sangat berpengaruh terhadap harga pasar namun tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, serta terdapat Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Pematang Jaya yang tidak sehat sehingga harus dilakukan likuidasi oleh OJK. Selain faktor tersebut, terdapat perbaikan kinerja sehingga masih bisa memenuhi target indikator dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian indikator ini tidak terlepas dari upaya penerapan strategi perbaikan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya dibawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Adapun perbaikan kinerja sebagai penopang pencapaian kinerja pada tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah

Indikator ini merupakan pelaksanaan fungsi koordinatif di bidang perekonomian dan pembangunan yang diamanatkan kepada Bagian Perekonomian dan SDA. Kebijakan strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah dan pengelolaan SDA untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memerlukan

pengelolaan yang baik sehingga bisa mendukung pencapaian tujuan daerah. Adapun indikator kinerja yang diamanatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	PERSENTASE TERLAKSANANYA KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH		78,2	72,72	92,99
1.	Pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	$[(\text{Jumlah kontribusi laba BUMD pada PAD tahun } n - \text{Jumlah kontribusi laba BUMD pada PAD tahun}(n-1))/\text{Jumlah kontribusi laba BUMD pada PAD tahun}(n-1)] \times 100\%$	10	8,73	87,3
2.	Rata-rata kepuasan layanan BUMD	Survey kepuasan layanan BUMD	81	79,88	98,62
3.	Peresentase meningkatnya peran dan fungsi TPID	Jumlah Rekomendasi yang ditindak lanjuti/ Jumlah rekomendasi yang ditetapkan x 100	100	100	100
4.	Persentase lembaga keuangan mikro yang sehat	$(\text{Jumlah lembaga keuangan mikro yang sehat}/\text{Jumlah lembaga keuangan mikro}) \times 100\%$	100	100	100
5.	Persentase ketataan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan	$(\text{Jml SDA yang dimanfaatkan}/\text{Jml potensi SDA}) \times 100\%$	100	100	100

BUMD dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan roda perekonomian daerah melalui upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, penyediaan dana bagi masyarakat, maupun menggerakkan masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta sebagai

salah satu sumber PAD. Peran BUMD cukup strategis dan signifikan, sehingga diperlukan tata kelola yang baik untuk bisa mendukung pencapaian tujuan daerah. Dana daerah yang dititipkan melalui penyertaan modal BUMD, sudah selayaknya didukung dengan penyusunan kebijakan yang baik dan berpihak kepada seluruh stake holder dengan mengedepankan keadilan.

Kinerja BUMD yang baik berawal dari sebuah kebijakan pengelolaan BUMD yang baik pula. Keberadaan BUMD tidak murni berorientasikan laba seperti halnya sektor swasta, namun juga ada sisi sosial. Hal tersebut tidak lepas dari kepemilikan modal yang terbesar adalah pemerintah, melalui mekanisme penyertaan modal maupun kepemilikan saham, yang keberadaannya berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Berpijak pada kinerja BUMD yang sehat, salah satu indikatornya adalah perolehan keuntungan yang baik dan terus meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan inovasi dan perbaikan kualitas layanan. Keuntungan tersebut selanjutnya akan diberikan kepada pemerintah daerah sebagai PAD, dengan proporsi pembagian yang telah ditentukan berdasarkan keputusan hasil rapat umum pemegang saham atau rapat sejenisnya.

Kinerja Pertumbuhan kontribusi laba BUMD di Kabupaten Pemalang terhadap PAD pada tahun 2024 sebesar 8,73% atau mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2023 yang hanya 4,065%. Kinerja ini didukung dengan adanya kebijakan pemerintah daerah untuk memberikan tambahan penyertaan modal yang berdampak pada peningkatan kinerja BUMD. Meskipun terjadi perbaikan kinerja, namun hal tersebut masih belum optimal dikarenakan oleh faktor:

- Realisasi besaran penyertaan modal belum selesai dengan rekomendasi dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana telah direkomendasikan berdasarkan hasil analisa.
- Kondisi perekonomian dan daerah yang belum stabil sehingga turut berpengaruh terhadap kinerja BUMD.

Untuk perbaikan kinerja kedepan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Pemalang bisa memberikan tambahan penyertaan modal sesuai dengan hasil kajian sehingga bisa memungkinkan BUMD untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan untuk mendukung perekonomian daerah.



Grafik 3. 1 Setoran Deviden BUMD di Kabupaten Pemalang

Atas kebijakan pengelolaan BUMD yang diterapkan, untuk mengetahui efisiensi dan efektifitasnya, maka digunakan survey kepuasan layanan. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat diinventarisir saran dan masukan dari akar rumput pelaksana kebijakan pengelolaan BUMD, akan bisa menghasilkan sebuah

kebijakan yang baik dan bisa diterapkan, serta bisa memberikan kepuasan layanan kepada semua stakeholder. Sdelanjutnya, dengan adanya saran dan masukan yang diperoleh, akan ada perbaikan pelaksanaan koordinasi antara semua pihak terkait, yang pada akhirnya akan bisa mendukung pencapaian tujuan daerah yang telah ditetapkan. Kinerja pada tahun 2024 sebesar 79,88 atau 98,62% dari target yang ditetapkan. Kinerja ini mengalami peningkatan bila diandingkan kinerja tahun 2023 sebesar 77,7. Hal yang menyebabkan belum optimalnya kinerja adalah masih perlunya perbaikan sarana dan prasarana layanan serta belum tersedianya saluran pengaduan. Untuk perbaikan kedepan, akan diupayakan perbaikan kualitas sarana dan prasarana layanan serta mengaktifkan kanal aduan lebih intensif.

Salah satu instrumen menjaga stabilitas perekonomian daerah adalah dengan mengendalikan laju inflasi daerah. Untuk itu Pemerintah daerah telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Pembentukan TPID memiliki tugas untuk mengumpulkan data dan informasi terkait perkembangan harga kebutuhan pokok di daerah, Menyusun kebijakan penanggulangan inflasi di daerah dengan mengacu kepada kebijakan pengendalian inflasi nasional, melakukan upaya perkuatan logistik di daerah, melakukan koordinasi dengan tim pengendali inflasi nasional dan tim pengendali inflasi provinsi, melakukan langkah-langkah lain untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten/Kota.

Dengan tugas yang diembankan, peran TPID menjadi sangat penting dalam mendukung stabilitas perekonomian daerah maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja TPID yang sangat diharapkan adalah terkendalinya inflasi daerah,

sehingga masyarakat bisa mencukupi kebutuhan pokok dengan mudah. Perpaduan arus permintaan dan penawaran barang yang seimbang diharapkan bisa memberikan keuntungan pembeli dan penyedia barang, serta tidak merugikan satu pihak dan memberikan keuntungan pihak lain.

Rekomendasi yang diberikan TPID sangat penting, karena akan menjadi langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah. Pada Tahun 2024, pemerintah daerah telah memenuhi 100 % rekomendasi yang diberikan. Pemenuhan rekomendasi tidak terlepas dari komitmen Pimpinan Daerah serta pihak terkait dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Berkaitan dengan pengendalian inflasi daerah, beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi rekomendasi TPID antara lain:

- Harga kebutuhan pokok yang sangat ditentukan melalui mekanisme pasar sehingga intervensi yang dilakukan pemerintah.
- Belum optimalnya sinergitas antara lembaga pemerintah baik pusat, provinsi, maupun daerah dengan sektor swasta dan pelaku usaha dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.
- Pada tahun 2024 berdasarkan laporan BPS terjadi deflasi, namun demikian belum ada kejelasan secara komprehensif terkait penyebab maupun dampak terhadap stabilitas perekonomian daerah.
- Penghitungan laju inflasi dilakukan secara regional, dimana karakteristik masyarakat, sosial, dan budaya yang cukup berbeda dapat menjadi penyebab kurangnya akurasi penghitungan angka inflasi daerah.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan rekomendasi TPID adalah berupaya meningkatkan kompetensi dan capacity

building perangkat daerah terkait sehingga diharapkan bisa memahami dan dapat merumuskan langkah strategis untuk mengaplikasikan rekomendasi pengendalian inflasi yang diterbitkan.

Indikator yang lain adalah Persentase lembaga keuangan mikro yang sehat. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat. Selain itu, LKM juga melakukan pengelolaan simpanan, serta pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Upaya ini dilakukan agar LKM dapat membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah. Keberadaan LKM telah dinaungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Dengan demikian keberadaan LKM merupakan Lembaga yang sah dan telah diatur dengan jelas melalui peraturan perundangan yang berlaku.

LKM memiliki tiga tujuan utama, yang pertama adalah untuk meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, terdapat masyarakat yang belum mampu mengajukan pinjaman pada lembaga keuangan formal seperti bank, misalnya masyarakat yang belum memiliki akses terhadap rekening bank atau tidak memiliki agunan. Untuk itu LKM dapat menjadi solusi. Tujuan yang kedua adalah untuk membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dengan meningkatkan akses pendanaan mikro, masyarakat memiliki alternatif modal usaha, sehingga

perekonomian masyarakat dapat meningkat dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan yang ketiga adalah untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah, sehingga dapat menjadi masyarakat yang berdaya. Berdasarkan hal tersebut, LKM memiliki andil yang cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah dan mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, pemerintah juga perlu terus memantau dan mengawasi keberadaan LKM yang salah satu tujuannya adalah menjamin Kesehatan operasionalnya.

Penilaian LKM dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, pemerintah daerah diharapkan bisa mengambil peran dengan menyediakan kebijakan yang mendukung keberadaan LKM di daerah, seperti mekanisme perijinan untuk berbadan hukum, permodalan, dan dukungan kebijakan lain yang mendukung tumbuh kembangnya LKM di daerah.

Pada tahun 2024 target kinerja indikator ini adalah 100 %. Adapun realisasi kinerja pada tahun 2024 sebesar 75 %, dibandingkan tahun 2022 kinerjanya belum mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan adanya pembekuan usaha satu LKM di Kabupaten Pemalang oleh OJK yaitu LKM BKD Pemalang. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh faktor:

- Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan Lembaga Keuangan Mikro, kegiatan tersebut dilakukan langsung oleh OJK. Pemerintah Daerah hanya diberikan laporan hasil penyelenggaraan monev.

- Masyarakat belum sepenuhnya mengetahui mekanisme aduan atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan sebuah lembaga keuangan mikro.

Upaya perbaikan kinerja kedepan adalah melakukan koordinasi lebih intensif dengan OJK selaku lembaga pembina dan pengawas LKM, sehingga diharapkan bisa menggali informasi terkait kondisi kesehatan LKM yang ada di Kabupaten Pemalang, sebagai upaya peringatan dini dan bahan pengambilan kebijakan apabila terjadi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat.

Indikator terakhir berupaya mengukur dampak dari upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah yaitu dengan pemanfaatan sumber daya alam oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang. Pemanfaatan SDA perlu dimonitor secara ketat, mengingat SDA merupakan hal yang dibutuhkan bersama oleh masyarakat di Kabupaten Pemalang. Pemanfaatan SDA diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan bukan menambah penderitaan bagi masyarakat. Ekses negatif harus diminimalisir seoptimal mungkin. Hal tersebut salah satunya diupayakan melalui pemenuhan aspek perijinan oleh perusahaan dalam pemanfaatan SDA. Realisasi Persentase ketataan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai peraturan perundangan pada tahun 2024 adalah 100%, sehingga perusahaan yang ada di Kabupaten Pemalang sejumlah 41 buah, telah memenuhi perijinan pemanfaatan SDA.

2. Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah

Indikator ini merupakan pelaksanaan fungsi koordinatif di bidang administrasi pembangunan daerah yang diamanatkan kepada Bagian Administrasi Pembangunan. Pelaksanaan

pembangunan daerah perlu direncanakan dan dimonitor dengan baik, sehingga menghasilkan output maupun outcome yang bisa mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya. Hal tersebut memerlukan pelaksanaan koordinasi yang baik ke semua unsur pelaksana pembangunan daerah. Kinerja dari indikator tersebut ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	PERSENTASE TERLAKSANANYA ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH		71,17	72,29	101,57
1.	Nilai RB Setda	Nilai RB Setda	53,25	53,22*	99,94
2.	Nilai SAKIP Setda	Nilai SAKIP Setda	67,25	67,22 *	99,96
3.	Nilai Pelaksanaan Indeks Pembangunan komponen kinerja pengendalian pembangunan	(kinerja Anggaran +kinerja output)/2 *100	93	96,42	103,68

Kinerja indikator Persentase Terlaksananya Administrasi Pembangunan Daerah didukung oleh pencapaian indikator Nilai RB Setda. Indikator ini menjadi penilaian pelaksanaan pembaruan di dalam tubuh perangkat daerah untuk mencapai efisiensi dan efektifitas organisasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut akan tercapai melalui tumbuhnya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Diharapkan dengan lingkungan birokrasi yang baik akan terbangun koordinasi yang baik pula, dan setelahnya didukung

dengan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan yang baik pula, akan bisa mensukseskan pencapaian tujuan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026.

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, maka penilaian RB dilakukan secara bertahap yaitu internal oleh Inspektorat dan eksternal oleh Kemenpan RB. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, nilai implementasi RB hanya diberikan Pemerintah Daerah, sementara untuk perangkat daerah tidak ada pemberian nilai maupun predikat lagi sebagaimana diatur dalam ketentuan sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 2024 tidak ada nilai atas implementasi RB pada semua perangkat daerah di Kabupaten Pemalang. Namin demikian, implementasi RB tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Untuk meningkatkan kualitas implementasi RB pada Sekretariat Daerah, upaya yang dilaksanakan antara lain:

- Meningkatkan komitmen Bersama, dari pimpinan perangkat daerah sampai dengan level pelaksana, bahwa implementasi Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, guna mendukung terciptanya lingkungan birokrasi yang baik dan melayani.
- Melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh evaluator, untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, seperti penajaman dan perbaikan rencana kerja RB untuk mendukung kinerja RB yang lebih terukur.

Indikator selanjutnya adalah Nilai SAKIP Setda, penyusunan SAKIP mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. SAKIP

merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan evaluasi, perangkat daerah akan Menyusun laporan kinerja yang berisikan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2024, target kinerja yang diharapkan adalah sebesar 67,25. Penilaian SAKIP berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat, dan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 67,22*. Peran SAKIP sangat besar dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, karena didalamnya menyajikan perencanaan dan realisasi kinerja yang selanjutnya setelah dilakukan evaluasi akan diberikan rekomendasi untuk perbaikan pencapaian kinerja pada masa mendatang. Diharapkan, dengan kinerja Sekretariat Daerah yang baik, akan mendukung pelaksanaan fungsi koordinatif pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan kinerja yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada masa mendatang antara lain:

- Meningkatkan koordinasi internal untuk lebih menanamkan pemahaman Bersama, terkait pentingnya pencapaian kinerja organisasi. Dimana hal tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan daerah.

- Berupaya memenuhi rekomendasi dari evaluator, sebagai langkah upaya meningkatkan kinerja perangkat daerah.

Indikator yang terakhir adalah Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja pengendalian pembangunan. Indikator ini berupaya memberikan gambaran terkait fungsi koordinatif dalam melaksanakan upaya-upaya yang mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan daerah guna pencapaian tujuan daerah. Pelaksanaan monitoring dan rapat koordinasi merupakan Langkah yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pematang Jaya bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Harapannya proses tersebut bisa diselesaikan tepat waktu dan dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan koordinasi ini juga diharapkan bisa menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien.

Target kinerja indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 93. Realisasi target kinerja ini adalah sebesar 96,42 atau meningkat bila dibandingkan periode sebelumnya sebesar 92,47. Pencapaian ini didukung melalui koordinasi dan pemantauan langsung ke lapangan terkait pembangunan pekerjaan fisik serta pelaksanaan pemantauan perkembangan realisasi fisik dan keuangan secara bulanan. Namun demikian, kegiatan tersebut masih belum optimal karena perangkat daerah belum dapat memperkirakan target yang akan dicapai secara tepat. Untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang, hal yang akan dilaksanakan antara lain:

- Menambah jumlah sampel pemantauan lapangan, diharapkan bisa menyentuh pelaksanaan kegiatan fisik yang

dilakukan melalui metode non tender dan pelaksanaan kegiatan hasil Pokir DPRD.

- Melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dibiayai melalui pola pendanaan yang mensyaratkan batas waktu pelaksanaan maupun penyerapan anggaran tinggi dalam tempo yang tidak begitu lama, seperti pelaksanaan kegiatan dari DAK dan DAU terikat.
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak terkait untuk percepatan dan pemenuhan target kinerja fisik dan keuangan.

3. Persentase Terlaksananya Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator ini merupakan pelaksanaan fungsi koordinatif di bidang pengelolaan barang dan jasa yang diamanatkan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Pelaksanaan pembangunan tidak bisa seutuhnya ditangani oleh aparat pemerintah daerah mengingat keterbatasan kuantitas maupun pengetahuan pelaksanaannya, sehingga harus diserahkan kepada pihak ketiga yang kompeten serta memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya. Diharapkan dengan adanya hal tersebut, pelaksanaan pembangunan akan lebih baik, efektif, dan efisien, serta bisa menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Pematang Jaya. Koordinasi yang baik dan intensif dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pematang Jaya harus dilaksanakan, terutama dalam hal kesiapan pelaksanaan tender, sehingga akan berdampak terhadap ketepatan penyelesaian pekerjaan dan efisiensi biaya pengerjaan. Indikator tersebut dibangun oleh kinerja dari hal-hal sebagaimana berikut:

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENGELOLAAN BARANG DAN JASA	Persentase terlaksananya pengelolaan barang dan jasa	94,44	86,93	92,04
1.	Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja layanan pengadaan	<i>Kinerja layanan Pengadaan = [Jumlah Paket tender yang diselesaikan tepat waktu sesuai RUP Jumlah paket tender yang selesai ! X60%] + [Jumlah Pelanggan (internal & eksternal) yang puas Jumlah Pelanggan yang disurvei X40%] X30%</i>	100	84,97	84,97
2.	Level maturitas PBJ	Penilaian LKPP (Perlem LKPP No. 5/2019)	9/9	8/9	88,89

Indikator pendukung yang pertama adalah Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja layanan pengadaan. Indikator ini memadukan kinerja penyelesaian tender yang tepat waktu dan kepuasan pelanggan atas layanan fasilitasi pelaksanaan tender yang dilakukan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan adanya tender yang selesai tepat waktu, maka pelaksanaan pekerjaan diharapkan akan segera berlangsung, dan akan selesai sesuai batas waktu yang ditentukan. Indikator ini juga menggunakan instrument survey kepuasan pelanggan, yang diharapkan bisa menemukenali kekurangan dalam pemberian layanan dan akan dijadikan sebagai pijakan untuk perbaikan ke depan. Pada tahun 2024

target kinerja yang diharapkan adalah 100, dan realisasi sebesar 84,97% atau naik dari tahun 2023 yang realisasinya mencapai 82,57 %. Hal tersebut didukung oleh faktor sebagai berikut:

- Pelaksanaan coaching clinic kepada perangkat daerah untuk meningkatkan kompetensi dan mencari solusi terkait permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa.
- Penyusunan surat edaran dan Pelaksanaan desk RUP secara periodik serta penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai kepada perangkat daerah yang terlambat dalam mengumumkan RUP mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan. Kondisi ini mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Namun demikian, kinerja masih belum optimal yang disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Perangkat Daerah belum sepenuhnya memahami tahapan pengadaan barang/jasa.
- Perangkat Daerah belum sepenuhnya dapat memperkirakan dengan tepat tata kelola waktu pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sarana dan prasarana layanan pengadaan yang belum memadai sesuai dengan ketentuan pengguna layanan.
- Minimnya tindak lanjut dari Perangkat Daerah terhadap hasil pembinaan dan sosialisasi terkait prosedur pengadaan yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan periodik.

Upaya perbaikan kinerja ke depan akan dilakukan melalui :

- Peningkatan kompetensi pelaku pengadaan khususnya PPKom untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi PPK yang terdiri dari PPK Tipe C, Tipe B dan Tipe 4.

- Mendorong kepemilikan Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa untuk Pejabat Administrator.

Indikator lain yang mendukung adalah Level Maturitas PBJ. Indikator ini didasarkan pada Perka LKPP Nomor 5 tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Pengukuran maturitas/kematangan pengadaan barang dan jasa dimaksudkan untuk:

- a. memberikan standar mutu dalam program pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ di lingkungan Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. memberikan acuan kepada UKPBJ dalam meningkatkan kapabilitas UKPBJ;
- c. memberikan status pencapaian UKPBJ sebagai pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- d. mendorong UKPBJ menjadi organisasi pembelajar yang selalu melakukan perbaikan berkelanjutan untuk fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang lebih baik.

Pada tahun 2024, target kinerja yang diharapkan adalah 9/9, dimana diharapkan akan terpenuhi satu aspek pendukung peningkatan maturitas dari Sembilan aspek penilaian. Realisasi kinerja adalah telah terpenuhi 8 aspek dari 9 aspek penilaian. Kinerja indikator ini belum memenuhi target dan pencapaiannya masih sama dengan tahun 2023 yaitu 8/9.

Selanjutnya, dapat dilihat bahwa realisasi kinerja "Tujuan/Sasaran" yang diukur dengan indikator **Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana** mengalami **peningkatan** dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat

sebesar **59,85** dan tahun **2023** menjadi **60,31**, yang menunjukkan **pencapaian kinerja ini melebihi dari target yang telah ditentukan**. Pencapaian kinerja yang melampaui target ditopang oleh adanya perbaikan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya, perbaikan kualitas layanan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan daerah, serta kepuasan layanan pendukung pelaksanaan tugas yang dinikmati oleh stakeholder pada Sekretariat Daerah.

Memasuki tahun 2024, realisasi kinerja menurun menjadi **60,29 %**, atau hanya 99,81 % dari target 60,40 %. Penurunan kinerja ini disebabkan adanya penurunan IKM pada layanan keprotokolan. Penyebab penurunan disebabkan perlunya perbaikan sarana dan prasarana keprotokolan. Namun demikian untuk kinerja yang lain terdapat perbaikan sehingga kinerja keseluruhan masih bisa memenuhi target kinerja yang diamanatkan dalam perjanjian kinerja. Pemenuhan target kinerja mencerminkan **adanya perbaikan kualitas kinerja yang dicapai melalui penerapan strategi peningkatan koordinasi antar instansi maupun pemahaman serta kesadaran untuk bersama-sama dalam mendukung pencapaian nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Pematang Jaya, dan perbaikan sarana dan prasarana pendukung layanan pada Sekretariat Daerah**.

1. Indeks Organisasi

Indikator penopang yang pertama adalah indeks organisasi. Indikator ini mencerminkan pelaksanaan koordinasi untuk perbaikan kualitas pemerintahan Kabupaten Pematang Jaya, sehingga bisa berjalan dengan baik, prosedural, dan memberikan kepuasan layanan bagi penggunanya. Hal tersebut dicerminkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang didalamnya menuntut jalannya pemerintahan dengan baik (*good governance*).

Birokrasi yang baik merupakan sebuah hal mutlak wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah, dari pucuk pimpinan sampai ke tingkatan pelaksana. Perubahan ini memerlukan komitmen Bersama oleh semua elemen pelaksana pemerintahan. Oleh karena itu, memerlukan koordinasi yang efektif dan efisien, sehingga mampu menggerakkan elemen-elemen tersebut untuk memahami dan berkemauan untuk mendukung jalannya pemerintahan yang baik.

Penanaman nilai-nilai etik melalui koordinasi dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan bisa memperbaiki kualitas pemerintahan Kabupaten Pemalang. Pencapaian target Indikator Indeks Organisasi menjadi kinerja Bagian Organisasi, yang secara kedinasan membantu tugas Asisten Administrasi Umum. Adapaun dasar pelaksanaan penilaian RB sebagai pijakan dalam pencapaian indikator Indeks Organisasi adalah Permenpan RB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024. Sedangkan Evaluasi implementasi RB menggunakan dasar Permenpan RB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Indikator terkait pencapaian Indeks Organisasi ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Bagian Organisasi

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	INDEKS ORGANISASI		1,734	1,855	106,98
1.	Nilai penataan organisasi	Hasil penilaian KEMENPAN RB	1,8	1,88	64,83
2.	Nilai peningkatan kualitas pelayanan publik	Hasil penilaian KEMENPAN RB	1,1	1,38	86,48

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
3.	Nilai penataan tata laksana	Hasil penilaian KEMENPAN RB	0,79	0,8	228,57
4.	Nilai SAKIP (komponen pengukuran dan pelaporan kinerja)	Hasil penilaian KEMENPAN RB	2,89	2,76	134,63
5.	Nilai manajemen perubahan	Hasil penilaian KEMENPAN RB	2,09	2,46	138,20

Berdasarkan tabel tersebut, Indeks Organisasi mengalami kenaikan 0,121 (106,98%).

- a. Nilai penataan organisasi mengalami kenaikan dengan capaian 104,4% karena Pemkab Pematang sudah menyusun Perbup SOTK untuk Perangkat Daerah yang terkena penyederhanaan birokrasi dan sudah melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk jabatan pengawas dan administrator sesuai ketentuan.
- b. Nilai peningkatan kualitas pelayanan publik mengalami kenaikan dengan capaian 125% karena Pemkab Pematang sudah mulai meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan sarana prasarana pelayanan publik dan kompetensi pelayan publik.
- c. Nilai penataan tata laksana mengalami kenaikan dengan capaian 101,27% karena Pemkab Pematang sudah Menyusun Perbup tentang Sistem Kerja dan mensosialisasikan ke Perangkat Daerah terutama yang mengalami penyederhanaan organisasi.
- d. Nilai SAKIP (komponen pengukuran dan pelaporan kinerja) mengalami penurunan dengan capaian 95,50% disebabkan:
 - ✓ pengukuran IKU banyak yang salah hitung dan belum dilengkapi formula penghitungan

- ✓ kualitas laporan kinerja perangkat daerah pada Sebagian perangkat daerah belum baik. Dan masih ada Sebagian perangkat daerah juga belum menyajikan analisis faktor penghambat/pendorong pencapaian kinerja. Data terutama pada indikator negatif masih ada yang kurang andal.
- e. Nilai manajemen perubahan mengalami kenaikan dengan capaian 117,70%. Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN Ber-AKHLAK diperoleh indeks BerAKHLAK 70,4% (cukup sehat) dimana mengalami kenaikan pada semua dimensi indeks BerAKHLAK hanya masih dalam kategori cukup sehat.

Dengan adanya perubahan tata cara penilaian RB, maka terdapat perubahan definisi operasional dari indikator penyusun Indeks Organisasi.

2. Persentase terlaksananya fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan

Indikator ini menjadi pelengkap dan penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok. Diharapkan dengan adanya fasilitasi layanan keprotokolan dan pendokumentasian pelaksanaan kegiatan KDH/WKDH akan memperlancar pelaksanaan tugas pokok lainnya. Indikator ini diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
	PERSENTASE TERLAKSANANYA FASILITASI KEPROTOKOLAN DAN KOMUNIKASI PIMPINAN		93.48	92,59	99.05

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1.	Tingkat kepuasan layanan keprotokolan	Hasil survey kepasan layanan keprotokolan	86,95	85,18	97,96
2.	Indeks dokumentasi KDH/WKDH	Jumlah kegiatan KDH dan WKDH terdokumentasi / Jumlah seluruh kegiatan KDH dan WKDH	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut Kepuasan layanan keprotokolan yang diberikan Bagian Prokompim terealisasi sebesar 85,18 atau 97,96 % dari target yang disepakati yaitu 86,95 , dan mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya dengan capaian 86,91. Layanan keprotokolan merupakan fungsi untuk memberikan kelancaran dan ketertiban agenda yang dihadiri oleh Pimpinan Daerah. Koordinasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan sebuah agenda. Penurunan kepuasan layanan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana layanan, penyederhanaan persyaratan, dan penanganan aduan layanan.
- Perlunya peningkatan koordinasi dengan pihak terkait untuk lebih meningkatkan kualitas layanan keprotokolan.
- Keterbatasan jumlah SDM untuk mengimbangi intensitas aktivitas KDH/WKDH.

Upaya perbaikan kinerja kedepan akan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut

- Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana layanan.

- Penambahan SDM yang berkapasitas untuk mengcover seluruh aktivitas KDH/WKDH.

Kehadiran Pimpinan Daerah dalam sebuah agenda perlu dikoordinir dan ditatausahakan dengan baik, mengingat banyaknya agenda yang akan dihadiri oleh Pimpinan Daerah. Prioritas, aspek kemendesakan, maupun dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan sebuah agenda menjadi sebuah analisa yang disajikan bagian Prokompim sebagai bahan masukan bagi Pimpinan Daerah, sehingga akan memudahkan dalam menentukan agenda mana saja yang diprioritaskan untuk dihadiri. Dalam pelaksanaan tugas, Bagian Prokompim akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan analisa tersebut. Dengan capaian kinerja ini, pelaksanaan fasilitasi keprotokolan bisa dinilai Baik.

Selanjutnya, dalam hal dokumentasi kegiatan KDH/WKDH, realisasi yang diperoleh adalah 100%. Kinerja indikator ini juga tidak bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya karena pada periode tersebut belum dilakukan penghitungan. Hal tersebut mengandung maksud seluruh target kegiatan agenda prioritas KDH/WKDH telah didokumentasikan oleh Bagian Prokompim. Pada tahun 2024, kegiatan prioritas Pimpinan Daerah yang berhasil didokumentasikan adalah sejumlah 784 kegiatan. Pendokumentasian kegiatan pimpinan menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, mengingat seringkali dalam sebuah agenda, pimpinan akan mengeluarkan arahan, pernyataan, maupun kebijakan yang akan digunakan sebagai bahan panduan dan pijakan bagi seluruh pelaksana Pemerintahan Daerah di Kabupaten Pematang Jaya. Semua kegiatan prioritas tersebut dikemas dalam sebuah dokumen yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh perangkat daerah.

Untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang, hal yang akan dilakukan adalah:

- Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana keprotokolan, komunikasi pimpinan dan Meningkatkan kemampuan digital/multimedia dan desain grafis bagi SDM pelaksana Dokumentasi Pimpinan sehingga data dokumentasi bisa dikelola secara maksimal, didukung dengan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, peningkatan literasi maupun penyelenggaraan diklat.
- Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan dan SOP, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
- Menciptakan terobosan dan inovasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas. (memaksimalkan penggunaan Aplikasi Kidalang (kegiatan Kepala Daerah Pemalang) dalam mendukung tugas dan fungsi Bagian Prokompim Setda Kabupaten Pemalang.

3. Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat

Indikator penopang ketiga adalah Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat, dengan indicator kinerja Persentase rata-rata capaian layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup secretariat, yang dalam pelaksanaannya diamanatkan kepada Bagian Umum. Indikator ini identik dengan indikator yang diamanatkan kepada Bagian Prokompim, yaitu bersifat supporting dalam pelaksanaan pelaksanaan fungsi utama sebagai koordinator dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Target kinerja pada tahun 2024 adalah 86 dan realisasi nya sebesar 86,42 atau 100,49 % dari target. Bila dibandingkan dengan tahun

2023 terjadi peningkatan kinerja dimana pada periode tersebut penilaian yang diperoleh adalah 85,98 atau terjadi kenaikan kinerja.

Hasil survey kepuasan yang cukup tinggi mengindikasikan pemberian layanan yang baik kepada stakeholder. Peningkatan kualitas layanan didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang memadai seperti pemanfaatan aplikasi persuratan, peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai, kemudahan mendapatkan akses layanan, alur layanan yang jelas dan pasti serta tanpa biaya layanan. Dengan dukungan pelaksanaan kegiatan yang baik, diharapkan akan bisa mendukung pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Daerah sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan daerah. Untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang, hal yang akan dilaksanakan antara lain:

- Evaluasi SOP untuk menyederhanakan prosedur dan efisiensi waktu proses, terutama dalam layanan pinjam pakai aset yang dikelola Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya oleh pihak lain.
- Perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan publik

"Tujuan/Sasaran" selanjutnya yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh** mengalami **penurunan** dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar **83,77**, dan pada tahun 2024 sebesar 83,64 yang menunjukkan adanya penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2024, realisasi kinerja menurun menjadi **83,64** atau 99,70% dari target yang ditentukan yaitu 83,89. Hal ini dikarenakan belum adanya perbaikan sarana dan prasarana layanan, perlunya penyempurnaan prosedur layanan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta pengelolaan aduan masyarakat atas kendala dalam pemanfaatan layanan.

Terakhir, kinerja "Tujuan/Sasaran" yang diukur dengan indikator **Nilai SAKIP** mengalami **peningkatan** dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022, realisasi kinerja untuk indikator tersebut tercatat sebesar **66,5** dan **pada tahun 2023 sebesar 67,22**, yang menunjukkan **adanya peningkatan kinerja**. Hal tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan koordinasi internal untuk mengidentifikasi permasalahan serta mencari solusinya secara periodik yaitu bulanan, serta pemenuhan rekomendasi LHE penilaian SAKIP oleh Inspektorat.

Namun demikian, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja masih harus berlanjut mengingat masih banyak area yang memerlukan perbaikan dan membutuhkan perhatian dari semua elemen yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Memasuki tahun 2024, nilai SAKIP belum dilakukan penilaian dan diperkirakan akan diterbitkan pada Triwulan II 2025. Dengan demikian, data ini menunjukkan **secara umum kinerja Sekretariat Daerah termasuk sangat baik, meskipun pada beberapa indikator kinerja masih memerlukan upaya perbaikan kinerja**. Hal tersebut menjadi sangat krusial untuk terus memantau indikator ini agar **sehingga terdapat perbaikan kinerja pada masa mendatang**.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan sarana dan prasarana layanan untuk bisa menjadi prioritas namun dengan tetap mempertimbangkan kapasitas anggaran dan efisiensi serta efektivitas dalam pelaksanaannya. Selain itu koordinasi internal dan dengan instansi terkait untuk selalu ditingkatkan sehingga dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas maupun pencapaian tujuan organisasi.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang Jaya periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut

Tabel 3. 12 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang Terlaksana	105,99	94,40	112,27
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	77,31	72,13	107,18
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	60,29	59,59	101,17
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat yangdiperoleh	83,64	NA	NA
		Nilai SAKIP	67,22	66	101,84

Sumber : Laporan Kinerja Sekretariat Daerah 2024

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra. tahun 2024 tercatat sebesar **105,99 %**. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 112,27 %. Data ini menunjukkan **progres yang signifikan**.

Sementara itu, realisasi kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan pada tahun 2024 tercatat sebesar **77,31 %**. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar **107,18 %**. Data ini menunjukkan **adanya progres kinerja yang sangat baik**. Namun demikian untuk lebih meningkatkan kinerja diperlukan alokasi anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana layanan serta pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang memerlukan penanganan secara lintas sektoral.

Terkait, realisasi kinerja Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Umum pada tahun 2024 tercatat sebesar **60,29**. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar **101,17 %**. Data ini menunjukkan **adanya progres kinerja yang sangat baik**. Namun demikian untuk lebih meningkatkan kinerja diperlukan alokasi anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana layanan, pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang memerlukan

penanganan secara lintas sektoral, pembinaan dan pendampingan terkait perbaikan tata kelola Implementasi Reformasi Birokrasi secara komprehensif baik level Pemerintah Daerah maupun level Perangkat Daerah.

Beralih kepada, realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh pada tahun 2024 tercatat sebesar **83,64**. Indikator ini belum tercantum dalam Renstra, namun bersumberkan pada Perjanjian Kinerja. Data ini menunjukkan **adanya penurunan kinerja namun masih dalam kategori sangat tinggi dalam pencapaiannya**. Untuk lebih meningkatkan kinerja diperlukan alokasi anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana layanan, penyederhanaan prosedur layanan melalui evaluasi Standar Operasional Prosedur Layanan, serta mengoptimalkan aduan masyarakat atas layanan yang diberikan melalui publikasi dan sosialisasi kanal aduan dan perbaikan SOP aduan.

Beralih kepada, realisasi kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2024 tercatat sebesar **67,22**. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar **101,84 %**. Data ini menunjukkan **adanya progres kinerja yang sangat baik**. Namun demikian untuk lebih meningkatkan kinerja diperlukan optimalisasi koordinasi internal untuk lebih cepat dalam menemukelali masalah dan mencari solusi bersama melalui pelaksanaan monev secara periodik, pemenuhan saran dan rekomendasi LHE SAKIP, pelaksanaan pengembangan kapasitas terkait implementasi SAKIP kepada pelaksana kegiatan.

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

1. Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian secara lintas sektoral dan sebagai sarana untuk evaluasi atas implementasi kebijakan maupun progres kinerja pemerintah daerah Kabupaten Pematang Jaya.
2. Pengalokasian anggaran untuk Perbaikan dan pemenuhan sarana prasarana layanan, penyederhanaan prosedur, serta meningkatkan fungsi aduan masyarakat atas layanan yang diberikan.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 13 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana	96,10	105,99	110,29	Dukungan kapasitas SDM untuk penyelesaian rancangan produk hukum menjadi produk hukum, dokumentasi produk hukum yang memadai, kemudahan aksesibilitas produk hukum, tertib pelaporan pada Kecamatan dan Kelurahan terkait pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat, fasilitasi kerjasama sesuai kebutuhan dalam menunjang tugas dan fungsi, perbaikan	Meningkatkan kapasitas SDM pada perangkat daerah untuk inventarisir kebutuhan kerjasama daerah, koordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki pelimpahan kewenangan kepada Camat untuk lebih mengoptimalkan layanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas SDM pada perangkat daerah dalam proses penyusunan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						fasilitasi penyelenggaraan peringatan keagamaan	produk hukum daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana	81,77	77,31	95,13	Didukung dengan pencapaian level maturitas PBJ yang sangat signifikan, perbaikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, perbaikan kualitas kinerja anggaran pemerintah daerah, perbaikan kinerja SAKIP Perangkat Daerah, serta kepatuhan perusahaan dalam pemenuhan perijinan pemanfaatan SDA.	Perbaikan strategi pengelolaan BUMD untuk meningkatkan kontribusi laba terhadap PAD, Pemenuhan rekomendasi TPID sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, pemantauan kesehatan lembaga keuangan mikro untuk bisa bersama-sama meningkatkan peran dalam pembangunan perekonomian daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	60,40	60,29	99,81	Perubahan regulasi terkait implementasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi menuntut semua pihak untuk dapat segera beradaptasi dengan hal tersebut untuk perbaikan kinerja organisasi, Perbaikan kualitas layanan publik melalui perbaikan unsur penilaian yang memiliki skor rendah	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terkait implementasi RB pada seluruh perangkat daerah, peningkatan SDM pelaksana untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Perbaikan dan peningkatan kualitas sarpras layanan, perbaikan dan penyempurnaan prosedur fasilitasi layanan keprotokolanan
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	83,89	83,64	99,70	Meningkatkan kualitas layanan melalui arahan pimpinan untuk selalu mengedepankan pelayanan	Perbaikan kualitas sarana dan prasarana, penyederhanaan prosedur layanan serta

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	urusan Pemerint ahan					prima kepada pengguna layanan, peningkatan kompetensi SDM, waktu pelayanan yang pasti. Namun demikian dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan belum dapat dipenuhi dalam waktu yang cepat dikarenakan keterbatasan kapasitas keuangan.	perbaiki sarana aduan masyarakat
		Nilai SAKIP	67,25	67,22*	99,96	Pemenuhan rekomendasi atas LHE SAKIP, pelaksanaan monev secara berkala yaitu bulanan, pendampingan dari instansi pembina secara terus menerus, peningkatan kapasitas SDM pelaksana.	Meningkatkan koordinasi internal untuk lebih menanamkan pemahaman atas pentingnya implementasi SAKIP untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, peningkatan kompetensi SDM atas implementasi SAKIP kepada seluruh elemen yang ada pada Sekretariat Daerah.

Sumber :Bagian pada Sekretariat Daerah Kab. Pemalang

Sebagai bagian dari proses evaluasi dan upaya perbaikan ke depan, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan yang telah terjadi. Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat

secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN	
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	96.10	105.99	110.29	15,944,376,006	13,545,619,655	84.96	15.04
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	81.27	77.31	95.13	2,275,253,366	2,216,050,998	97.40	2.60
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Umum	60.4	60.29	99.82	33,664,893,899	31,665,649,755	94.06	5.94
4	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	82.6	83.64	101.25	71,026,000	65,359,316	92.02	7.98
		67.25	67.22	99.96				

Sumber :SIMDA 2024

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra mencapai efisiensi sebesar **5,94 %**, yang termasuk dalam kategori "**Efisien**". Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena

peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif.

2. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan mencapai efisiensi sebesar **2.60%**, yang termasuk dalam kategori "**Efisien**". Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena terdapat perbaikan kinerja diperoleh melalui **peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif**, koordinasi antar lembaga yang berjalan baik, penerapan SOP dan SPP dalam melakukan layanan publik dengan baik, pendampingan proses PBJ, monev periodik pelaksanaan pembangunan daerah, perbaikan strategi pengelolaan BUMD.
3. Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi Umum mencapai efisiensi sebesar **5.94%**, yang termasuk dalam kategori "**Efisien**". Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena **peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif**, koordinasi antar lembaga yang berjalan baik, penerapan SOP dan SPP dalam melakukan layanan publik dengan baik, pendampingan layanan konsultasi untuk perbaikan kualitas kinerja kepada seluruh perangkat daerah.
4. Sasaran Indeks Kepuasan yang diperoleh mencapai efisiensi sebesar **7.98%**, yang termasuk dalam kategori "**Efisien**". Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena **peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif**, penerapan SOP dan SPP dalam melakukan layanan publik dengan baik.
5. Sasaran Nilai SAKIP mencapai efisiensi sebesar **7.98 %**, yang termasuk dalam kategori "**Efisien**". Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena **peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif**, pendampingan dari instansi

pembina secara kontinyu, koordinasi internal yang baik dan mendukung proses perbaikan kinerja.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3. 15 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana	110,29	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana	110,29	Menunjang	Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang kinerja organisasi, peningkatan kompetensi SDM untuk menunjang kinerja organisasi
				Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya administrasi tata pemerintahan	100	Menunjang	Mendukung perbaikan kinerja tertib administrasi pelaporan pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat, Perbaikan kualitas LPPD, dan fasilitasi pelaksanaan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kerjasama/sinergi daerah
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat	98,91	Menunjang	Mendukung fasilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sosial melalui pemberian bantuan keagamaan, pelaksanaan rakor penanggulangan kemiskinan daerah
				Fasilitasi dan koordinasi Hukum	Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat	96,38	Menunjang	Mendukung peningkatan kinerja berupa penyelesaian produk hukum daerah, pelaksanaan pendokumentasian produk hukum
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti	100	Menunjang	Mendukung pelaksanaan fasilitasi maupun evaluasi kerjasama daerah
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	95,13	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	95,13	Menunjang	Perlu upaya perbaikan kinerja terkait kontribusi laba BUMD, pengendalian inflasi daerah, koordinasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dengan lembaga terkait untuk menunjang kinerja organisasi
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah	92,99	Menunjang	Mendukung peran serta dalam peningkatan perekonomian daerah melalui kontribusi laba BUMD dan pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok guna pengendalian inflasi
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Perentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah	101,57	Menunjang	Mendukung dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terlaksananya pengelolaan barang dan jasa	92,04	Menunjang	Mendukung dalam proses fasilitasi PBJ
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase ketaatan perusahaan dalam pemanfaatan SDA sesuai	92,99	Menunjang	Mendukung dalam pelaksanaan koordinasi pengendalian pemanfaatan SDA di daerah
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di	99,81	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di	99,81	Menunjang	Perlunya optimalisasi koordinasi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Umum	bidang Administrasi Umum yang terlaksana		Kabupaten/ Kota	Bidang Administrasi Umum yang terlaksana			dengan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kinerja organisasi, peningkatan kompetensi SDM pelaksana untuk mendukung
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendukung dalam proses perencanaan perangkat daerah, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset perangkat daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendukung dalam proses perencanaan perangkat daerah, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset perangkat daerah
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendukung dalam proses perencanaan perangkat daerah

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								, pengel olaan keuan gan, penata usaha an aset perang kat daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendu kung dalam proses perenc anaan perang kat daerah , pengel olaan keuan gan, penata usaha an aset perang kat daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendu kung dalam proses perenc anaan perang kat daerah , pengel olaan keuan gan, penata usaha an aset perang kat daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendu kung dalam proses perenc anaan perang kat daerah , pengel olaan keuan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								gan, penata usaha an aset perang kat daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendu kung dalam proses perenc anaan perang kat daerah , pengel olaan keuan gan, penata usaha an aset perang kat daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendu kung dalam proses perenc anaan perang kat daerah , pengel olaan keuan gan, penata usaha an aset perang kat daerah
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendu kung dalam proses perenc anaan perang kat daerah , pengel olaan keuan gan, penata usaha an aset

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								perangkat daerah
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	100,49	Menunjang	Mendukung dalam proses perencanaan perangkat daerah, pengelolaan keuangan, penataan aset perangkat daerah
				Penataan Organisasi	Indeks organisasi	106,98	Menunjang	Mendukung dalam upaya pemenuhan implementasi Reformasi Birokrasi daerah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase terlaksananya Fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	99,05	Menunjang	Mendukung untuk pelaksanaan fasilitasi layanan keprotokolan dan supporting kelancaran tugas KDH lainnya

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	83,64	<ul style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Program Perekonomian dan Pembangunan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana	99,81 95,13 110,29	Menunjang	Menunjang pelaksanaan Layanan kepada masyarakat
	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP	67,22	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	95,13	Menunjang	Menunjang pelaksanaan SAKIP pada perangkat daerah

Sumber :Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Triwulan IV 2024

Uraian penjelasan tabel:

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Program **Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** memiliki realisasi kinerja sebesar **110,29 %**, yang termasuk dalam kategori "**baik**". Pencapaian tersebut **menunjang** ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena "**pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan**" atau "**terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan**".
2. Program **Perekonomian dan Pembangunan** memiliki realisasi kinerja sebesar **95,13 %**, yang termasuk dalam kategori "**baik**". Pencapaian tersebut **menunjang** ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena **pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut belum berhasil memenuhi target yang diinginkan. Namun demikian, apabila dilihat lebih lanjut, terdapat perbaikan kinerja apabila dibandingkan periode tahun 2023.**
3. Program **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** memiliki realisasi kinerja sebesar **99,81 %**, yang termasuk dalam kategori "**baik**". Pencapaian tersebut **menunjang** ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meskipun **pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut belum berhasil memenuhi target yang diinginkan**" atau "**terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan**". Penurunan kinerja disebabkan perlunya peningkatan kualitas layanan sehingga dapat menghasilkan kepuasan pelanggannya.

3.1 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber

daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	33.664.893.899	31.665.649.755	94,06
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	20.000.000	19.618.750	98,09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	20.399.891.381	19.104.207.816	93,65
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.	5.500.000	5.149.000	93,62
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	236.960.000	230.169.032	97,13
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.523.356.200	1.496.535.259	98,24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	666.411.100	662.040.200	99,34
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	3.675.877.188	3.425.214.033	93,18
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	2.204.622.663	2.198.163.696	99,71
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	1.008.001.580	723.686.506	71,79
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.	2.873.876.787	2.757.924.619	95,97
Penataan Organisasi	570.397.000	565.114.139	99,07
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.	480.000.000	477.826.705	99,55
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	15.944.376.006	13.545.619.655	84,96
Administrasi Tata Pemerintahan.	756.055.556	725.236.232	95,92
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.	14.207.412.000	11.896.286.444	83,73
Fasilitasi dan koordinasi Hukum.	755.908.450	706.497.038	93,46
Fasilitasi Kerjasama Daerah.	225.000.000	217.599.941	96,71
Program Perekonomian dan Pembangunan.	2.275.253.366	2.216.050.998	97,40
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.	306.610.500	287.730.655	93,84
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	657.523.045	646.085.900	98,26
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	713.240.000	699.353.741	98,05
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.	597.879.821	582.880.702	97,49

Sumber : SIMDA PENATAUSAHAAN 2024

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat realisasi dan serapan anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah analisis terhadap data tersebut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **94,06%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut **terrealisasi**. Hal ini disebabkan oleh **tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program**. Selain itu terjadi kekosongan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini menyebabkan gaji yang tidak terbayarkan dan rumah dinas yang tidak ter huni sehingga tagihan rumah tangga wakil kepala daerah berkurang.
2. Program **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **84.96%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut **terrealisasi** Hal ini disebabkan oleh **tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program**.
3. Program **Perekonomian dan Pembangunan** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **97.40%**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut **terrealisasi**. Hal ini disebabkan oleh **tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan dana dan pelaksanaan program**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Nama Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang memiliki empat sasaran strategis dengan dua sasaran strategis tercapai yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra dan Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh. Sementara itu untuk dua sasaran yang lain yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan dan Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Administrasi

Umum tidak mencapai target, Namun demikian terdapat tren kinerja yang positif apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang adalah belum optimalnya koordinasi antar instansi, peningkatan kompetensi SDM pelaksana, perbaikan sarana dan prasarana layanan, penyederhanaan sistem dan prosedur layanan, meningkatkan layanan aduan pengguna layanan.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan dan perbaikan kinerja organisasi.
2. Alokasi anggaran untuk perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana layanan publik.
3. Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stake holder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pematang.

Pematang, 26 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



HERJANTO, S.Pd, M.Si
NIP. 19680214 199103 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERIYANTO, S.Pd., M.Si.**
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MANSUR HIDAYAT**
Jabatan : **BUPATI PEMALANG**
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pemalang, 23 September 2024

Pihak Kedua,
BUPATI PEMALANG

MANSUR HIDAYAT

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

HERIYANTO, S.Pd., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2024	TW.1	TW.2	TW.3	TW.4
1.	meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan dan kesra	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Persen	96.10	4.17	16.67	4.17	71.09
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang perekonomian dan pembangunan	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana.	Persen	81.27	1.67	17.92	2.33	59.35
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana.	Persen	60.40	4.17	25.49	4.17	26.57
4	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan Pemerintahan	Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh	Indeks	83.89	-	83.89	-	83.89
		Nilai SAKIP	Nilai	67.25	-	-	67.25	-

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	KETERANGAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	33.664.893.899	DAU
2.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.944.376.006	DAU
3.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.275.253.366	DAU
JUMLAH		51.884.523.271	

Pihak Kedua,

BUPATI PEMALANG



MANSUR HIDAYAT

Pemalang, 23 September 2024

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



HERIYANTO, S.Pd. M.Si.

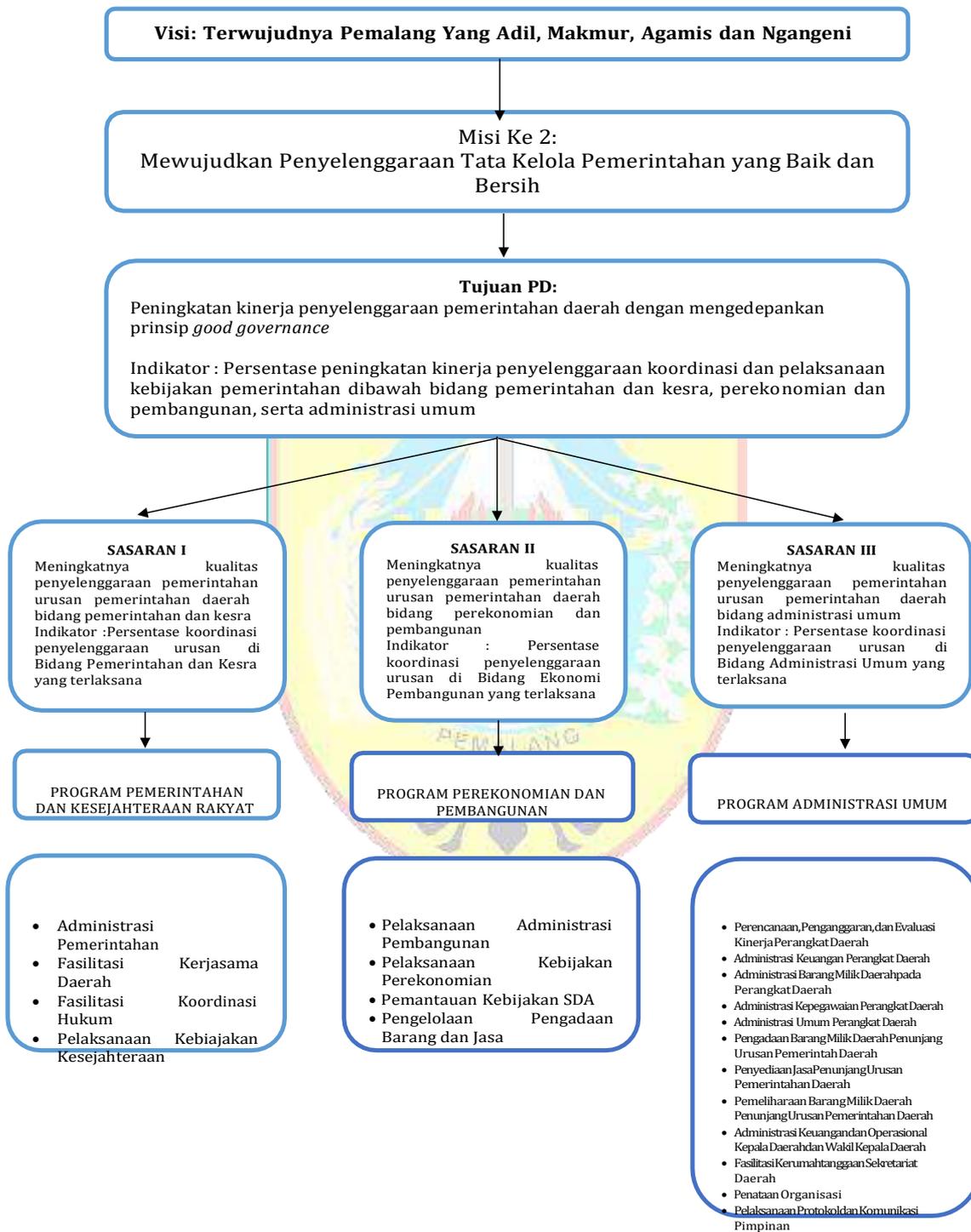
Lampiran 2 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Nama Perangkat Daerah Nama Daerah selama 5 tahun

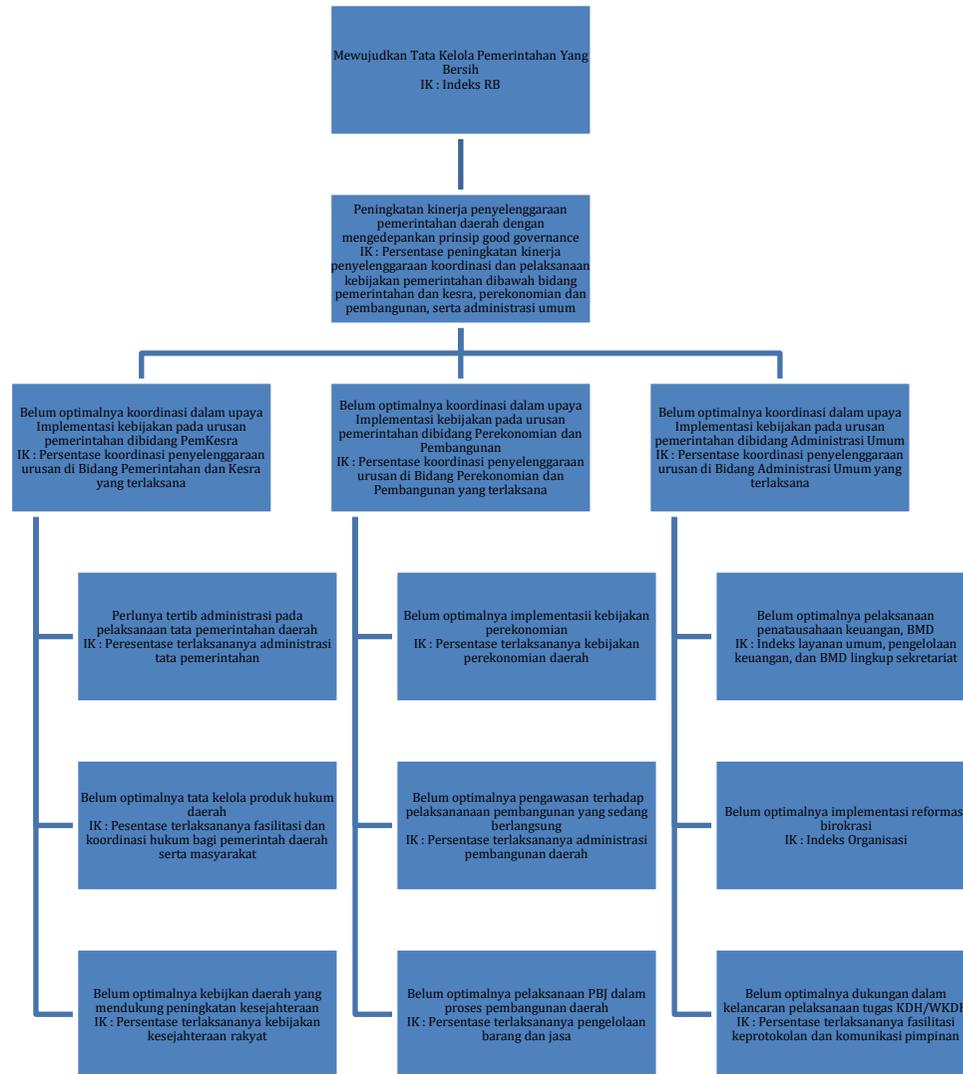
No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan mengedepankan prinsip Good governance			Persentase capaian kinerja penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibawah bidang pemerintahan dan kesra, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi umum	Na	71,9	73,0	73,7	74,9	75,4
		1.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Pemerintahan dan Kesra.	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana	Na	91,93	92,27	93,13	93,87	94,40
		1.2	Meningkatnya kualitas	Persentase koordinasi penyelenggaraan	Na	65,81	68,40	69,13	71,52	72,13

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang Terlaksana						
		1.3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan daerah bidang administrasi umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	Na	57,87	58,37	58,77	59,18	59,59

Lampiran 3. Cascading Visi, Misi Daerah Ke Perangkat Daerah



LAMPIRAN 4 POHON KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG



Lampiran 5 Penghargaan yang diperoleh



MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN
KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: MHA-01.HA.02.01.01 Tahun 2024

Diberikan kepada :

KABUPATEN PEMALANG

Yang telah :

Mendapatkan Predikat Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023

Jakarta, 10 Desember 2024
Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia



Natalius Pigai



HASIL PENILAIAN DAERAH KABUPATEN /KOTA PEDULI HAM
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

NO	PARAMETER PENILAIAN	NILAI CAPAIAN
A	KELOMPOK HAK	
1	HAK ATAS BANTUAN HUKUM	80.00
2	HAK ATAS INFORMASI	85.00
3	HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN	100.00
4	HAK ATAS KEBERAGAMAN DAN PLURALISME	75.00
5	HAK ATAS KEPENDUDUKAN	90.00
6	HAK ATAS KESEHATAN	92.00
7	HAK ATAS PENDIDIKAN	78.00
8	HAK ATAS PEKERJAAN	69.00
9	HAK ATAS LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT SERTA HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK	85.00
10	HAK PEREMPUAN DAN ANAK	100.00
	Rata-rata Nilai Sub Kelompok A	85.40
B	IMPLEMENTASI AKSI HAM 2023	
	Sub Total Nilai Kelompok B	10.00
C	PENGURANGAN NILAI	0.00
D	TOTAL NILAI	95.40
E	KRITERIA: PEDULI HAM	

Jakarta, 25 Oktober 2024
Direktur Jenderal HAM

Putra
09091993031001

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			BAGIAN UMUM							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00				
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00				
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya peningkatan nilai penyelenggaraan pemerintahan urusan administrasi umum					-	58.77 Persen	27.724.367.549,00	33.023.812.899,00	33.664.893.899,00	5.748.645.092,00							33.473.012.641,00			
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat					-	82.7 Indeks	27.500.000,00	27.500.000,00	20.000.000,00	-7.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.01.0001							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27.500.000,00	27.500.000,00	20.000.000,00	-7.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;				45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat					-	82.7 Indeks	17.800.743.641,00	21.949.613.741,00	20.399.891.381,00	2.599.147.740,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		21.055.104.424,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.0001							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													20.951.857.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				174 Orang/bulan	150 Orang/bulan	17.328.160.900,00	21.867.443.000,00	20.308.539.000,00	2.980.378.100,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;				20.951.857.500,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.0003							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													84.476.924,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	461.382.741,00	70.970.741,00	80.152.381,00	-381.230.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;				84.476.924,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.0005							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													11.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;				11.070.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.02.0007							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													7.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;				7.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat					-	82.7 Indeks	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.03.0006							Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;				9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat					-	82.7 Indeks	254.025.000,00	251.960.000,00	236.960.000,00	-17.065.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		366.685.200,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.05.0002							Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													55.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				4 Paket	2 Paket	33.300.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;				55.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.05.0003							Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													7.721.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	1 Dokumen	4.625.000,00	4.625.000,00	4.625.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;				7.721.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.01.2.05.0010							Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															

			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			75 Orang	112 Orang	193.500.000,00	193.500.000,00	178.500.000,00	-15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			265.785.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			13 Orang	13 Orang	22.600.000,00	20.535.000,00	20.535.000,00	-2.065.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			37.679.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat			-	82,7 Indeks	853.018.190,00	997.083.190,00	1.523.356.200,00	670.338.010,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		1.373.193.470,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	35.082.500,00	35.082.500,00	0,00	-35.082.500,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4	NON URUSAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	26.134.300,00	28.724.300,00	40.724.300,00	14.590.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			43.515.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	23.972.890,00	90.972.890,00	132.617.890,00	108.645.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-			39.945.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	17.970.000,00	17.970.000,00	24.702.000,00	6.732.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			29.947.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			12 Paket	12 Paket	59.983.500,00	59.983.500,00	82.983.500,00	23.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			99.974.170,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			9 Dokumen	4 Dokumen	88.900.000,00	88.375.000,00	88.900.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			148.174.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	117.905.000,00	132.905.000,00	199.150.000,00	81.245.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			196.516.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	483.070.000,00	543.070.000,00	859.196.510,00	376.126.510,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			756.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat			-	82,7 Indeks	98.285.850,00	331.361.100,00	666.411.100,00	568.125.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		163.235.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			0 Unit	1 Unit	100.000,00	100.000,00	38.106.000,00	38.006.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			200 Unit	24 Unit	78.911.100,00	136.411.100,00	136.411.100,00	57.500.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			31.235.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			50 Unit	25 Unit	19.274.750,00	194.850.000,00	491.894.000,00	472.619.250,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			132.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat						-	82.7 Indeks	3.522.567.188,00	3.522.567.188,00	3.675.877.188,00	153.310.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	3.793.882.850,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12 Laporan	12 Laporan	24.840.000,00	24.840.000,00	30.840.000,00	6.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		41.407.250,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		1.135.457.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	213.781.600,00	213.781.600,00	261.091.600,00	47.310.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		356.300.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 Laporan	12 Laporan	2.283.945.588,00	2.283.945.588,00	2.283.945.588,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		2.260.717.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat						-	82.7 Indeks	731.002.100,00	1.356.502.100,00	2.204.622.663,00	1.473.620.563,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	1.479.015.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						6 Unit	6 Unit	104.655.000,00	104.655.000,00	0,00	-104.655.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	NON URUSAN									35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya						150 Unit	153 Unit	432.130.900,00	500.630.900,00	844.841.000,00	412.710.100,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		558.001.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																				
		Jumlah Mebel yang Dipelihara						50 Unit	83 Unit	24.750.000,00	64.750.000,00	0,00	-24.750.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4	NON URUSAN									35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX									35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																				
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH									35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						10 Unit	6 Unit	101.430.200,00	618.430.200,00	922.720.663,00	821.290.463,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-		638.878.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						175 Unit	222 Unit	68.036.000,00	68.036.000,00	148.216.000,00	80.180.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		113.655.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat						-	82.7 Indeks	1.000.666.340,00	1.000.666.340,00	1.008.001.580,00	7.335.240,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	1.017.818.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																				
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	785.318.000,00	785.318.000,00	785.318.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		785.318.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																				
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan						12 Paket	12 Paket	187.500.000,00	187.500.000,00	187.500.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;		187.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang	2 Orang	27.848.340,00	27.848.340,00	35.183.580,00	7.335.240,00	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Indeks layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat				-	82.7 undefined	2.560.662.000,00	2.630.662.000,00	2.873.876.787,00	313.214.787,00			-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			2.892.020.561,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.800.000.000,00	1.820.000.000,00	2.029.361.787,00	229.361.787,00	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			1.783.690.811,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	143.322.000,00	143.322.000,00	175.000,00	-143.147.000,00	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			485.229.750,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	617.340.000,00	667.340.000,00	0,00	-617.340.000,00	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	NON URUSAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			BAGIAN ORGANISASI								35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00					56.914.273.750,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase terwujudnya peningkatan nilai penyelenggaraan pemerintahan urusan administrasi umum				-	58.77 Persen	27.724.367.549,00	33.023.812.899,00	33.664.893.899,00	5.748.645.092,00							33.473.012.641,00	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Indeks Organisasi				-	1.734 Indeks	470.397.240,00	470.397.240,00	570.397.000,00	99.999.760,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pematang		783.995.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	138.759.240,00	138.759.240,00	225.659.000,00	86.899.760,00	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			231.265.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	103.980.000,00	103.980.000,00	115.619.000,00	11.639.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			173.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				2 Dokumen	2 Dokumen	99.198.000,00	99.198.000,00	65.678.500,00	-33.519.500,00	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			165.330.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Dokumen	2 Dokumen	51.960.000,00	51.960.000,00	53.421.000,00	1.461.000,00	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			86.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Dokumen	2 dokumen Dokumen	76.500.000,00	76.500.000,00	110.019.500,00	33.519.500,00	Kab. Pematang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			127.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
			BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00					56.914.273.750,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana				-	69.13 Persen	1.105.670.045,00	1.460.670.045,00	2.175.253.366,00	736.514.198,00							1.842.184.243,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase terlaksananya administrasi pembangunan daerah				-	68.08 Persen	272.499.045,00	357.499.045,00	657.523.045,00	385.024.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pematang		454.081.743,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	71.026.000,00	71.026.000,00	71.026.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			103.319.976,00	SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																				
4.01.03.2.02.0002			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	100.433.045,00	185.433.045,00	485.457.045,00	385.024.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			143.809.698,00	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																				
4.01.03.2.02.0003			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	4 Laporan	101.040.000,00	101.040.000,00	101.040.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			206.952.069,00	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN																				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana				-	93.13 Persen	6.857.300.256,00	17.722.625.006,00	15.264.376.006,00	14.741.776.610,00							21.599.076.866,00	
4.01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase terlaksananya administrasi pemerintahan				-	100 Persen	191.055.556,00	656.055.556,00	756.055.556,00	565.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		393.425.928,00	SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Administrasi Pemerintahan																				
4.01.02.2.01.0001			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	31.055.556,00	125.055.556,00	155.055.556,00	124.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			90.882.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																				
4.01.02.2.01.0002			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	75.000.000,00	95.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			45.665.048,00	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																				
4.01.02.2.01.0003			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	456.000.000,00	506.000.000,00	356.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			256.878.880,00	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02.2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase terlaksananya fasilitasi kerjasama dan sinergi daerah				-	100 Persen	90.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	135.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		175.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																				
4.01.02.2.04.0001			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	80.000.000,00	165.000.000,00	206.000.000,00	126.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																				
4.01.02.2.04.0002			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000,00	50.000.000,00	9.000.000,00	8.850.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																				
4.01.02.2.04.0003			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	2 Laporan	9.850.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	150.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																				
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana				-	93.13 Persen	6.857.300.256,00	17.722.625.006,00	15.264.376.006,00	14.741.776.610,00							21.599.076.866,00	
4.01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya kebijakan kesejahteraan rakyat				-	92.6 Persen	6.008.000.000,00	16.243.900.000,00	13.527.412.000,00	7.519.412.000,00			-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			20.083.576.438,00	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																				
4.01.02.2.02.0001			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	5.850.000.000,00	16.085.900.000,00	13.369.412.000,00	7.519.412.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			19.868.576.438,00	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																				
4.01.02.2.02.0002																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				2 Dokumen	2 Dokumen	133.000.000,00	133.000.000,00	133.000.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.02.2.02.0003						Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat															
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
							BAGIAN HUKUM			35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00						56.914.273.750,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00						56.914.273.750,00				
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00						56.914.273.750,00				
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terlaksana				-	93,13 Persen	6.857.300.256,00	17.722.625.006,00	15.264.376.006,00	14.741.776.610,00						21.599.076.866,00				
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase terlaksananya fasilitasi dan koordinasi hukum bagi pemerintah daerah serta masyarakat				-	86,8 Persen	568.244.700,00	597.669.450,00	755.908.450,00	187.663.750,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang	947.074.500,00	SEKRETARIAT DAERAH			
	4.01.02.2.03.0001						Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah															
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				550 Dokumen	550 Dokumen	154.542.600,00	154.542.600,00	184.648.600,00	30.106.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			257.571.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.02.2.03.0002						Fasilitasi Bantuan Hukum															
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum				2 Kasus	2 Kasus	214.004.400,00	214.004.400,00	273.004.400,00	59.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			356.674.000,00	SEKRETARIAT DAERAH		
	4.01.02.2.03.0003						Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum															

			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				550 Dokumen	550 Dokumen	199.697.700,00	229.122.450,00	298.255.450,00	98.557.750,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			332.829.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
			BAGIAN PEREKONOMIAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							35.687.337.850,00	52.207.107.950,00	51.104.523.271,00	15.417.185.421,00							56.914.273.750,00		
1.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana				-	69.13 Persen	1.105.670.045,00	1.460.670.045,00	2.175.253.366,00	736.514.198,00							1.842.184.243,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian daerah				-	78.2 Persen	236.610.500,00	306.610.500,00	306.610.500,00	70.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		392.737.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				3 Dokumen	3 Dokumen	123.750.000,00	193.750.000,00	193.750.000,00	70.000.000,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			206.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	68.468.000,00	68.468.000,00	68.468.000,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			112.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	44.392.500,00	44.392.500,00	44.392.500,00	0,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			73.987.500,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan SDA				-	78.2 Persen	101.560.500,00	101.560.500,00	597.879.821,00	496.319.321,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;	Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Pemalang		170.365.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				2 Dokumen	2 Dokumen	60.399.000,00	60.399.000,00	556.718.321,00	496.319.321,00	Kab. Pemalang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul; 4. Pengembangan SDM berkarakter budaya unggul;			100.665.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	

LAMPIRAN 7. MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKIP

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN
1	Membuat Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja untuk mendukung pelaksanaan kinerja organisasi yaitu pedoman atas penyusunan sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja yang akan dicapai serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Juga memuat pedoman pengumpulan data kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, bukan Pedoman Perencanaan Kinerja untuk penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);	Penyusunan Pedoman Teknis Pengumpulan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024	Bag. Adpemb	Selesai
2	Menyusun Kerangka Acuan Kinerja Kegiatan (KAK) Tahun 2024 untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan ketentuan;	Penyusunan KAK untuk seluruh sub kegiatan	Seluruh bagian	Selesai
3	Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang melibatkan pimpinan unit organisasi (minimal setingkat eselon III) secara berkala dan dilengkapi dengan administrasi pelaksanaannya.	melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang melibatkan pimpinan unit organisasi (minimal setingkat eselon III) secara berkala dan dilengkapi dengan administrasi pelaksanaannya	Bag. Adpemb	Selesai